

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2016



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
Jl. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta No.Telp. (0271) 639554, 642020 psw 553

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2016



Disusun Oleh :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surakarta

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2016

Susunan Tim Penyusun :

Pengarah : Walikota Surakarta
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Dispendukcapil
3. Kabid Pendaftaran Penduduk, Dispendukcapil
4. Kabid Pencatatan Sipil, Dispendukcapil
5. Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bappeda
6. Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas Sosial
7. Kasi Pengolahan & Penyajian Data Kependudukan, Dispendukcapil
8. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Dispendukcapil
9. Kasi Kasi Tata Kelola & SDM TI & Komunikasi, Dispendukcapil
10. Kasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, DKK
11. Pengelola Sarana Prasarana, Dinas Pendidikan
12. Staf Seksi Statistik Sosial, BPS

Staf Teknis :

1. Staf Bidang PIAK, Dispendukcapil
2. Staf Bidang Pencatatan Sipil, Dispendukcapil
3. Kasubag Umum & Kepegawaian, Dispendukcapil

Layout/Grafis : Bambang Supriyadi, S.Kom.
Dokumentasi : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Surakarta

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan, Pemerintah Kota Surakarta menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016.

Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai aspek kependudukan Kota Surakarta sehingga dapat dimanfaatkan guna pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan dan bantuan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2016 ini.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA




SUWARTA, SH., MM.
NIP. 196803241993121001



WALIKOTA SURAKARTA

SAMBUTAN WALIKOTA SURAKARTA

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016.

Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016 Kota Surakarta disusun guna memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan dan berbagai aspek kependudukan serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Diharapkan buku ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konkrit tentang berbagai aspek kependudukan Kota Surakarta sehingga dapat dimanfaatkan guna pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan.

Semoga Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta bermanfaat bagi pengembangan program pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan.

WALIKOTA SURAKARTA


FX. HADI RUDYATMO

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Sambutan Walikota.....	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xiv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	2
BAB II Gambaran Umum Kota Surakarta	4
A. Letak Geografis	6

B. Kondisi Geografis	6
C. Gambaran Ekonomi Kota Surakarta	7
D. Potensi Daerah	8
BAB III Sumber Data	10
BAB IV Perkembangan Kuantitas Penduduk	12
A. Jumlah Dan Persebaran Penduduk	12
1. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin	12
2. Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan	16
3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	17
B. Penduduk Menurut Karakteristik PerKecamatan	18
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Piramida dan Rasio Ketergantungan.....	18
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin	21
3. Profil Kependudukan dari Aspek Keluarga	29
4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	44

5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian	46
BAB V Kualitas Dan Mobilitas Penduduk	50
A. Aspek Kesehatan	50
B. Aspek Pendidikan	53
C. Aspek Ekonomi	54
D. Aspek Sosial	59
E. Aspek Mobilitas/Migrasi.....	61
BAB VI Kepemilikan Dokumen Kependudukan	64
A. Kepemilikan Kartu Keluarga	64
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	67
C. Penerbitan Akta	68
1. Akta Kelahiran	68
2. Akta Kematian	69
3. Akta Perkawinan	71

4. Akta Perceraian	71
5. Pengakuan, Pengesahan, Pengakatan Anak	72
BAB VII Kesimpulan Dan Implikasi	73
A. Kesimpulan	73
1. Aspek Kuantitas	73
2. Aspek Kualitas	74
3. Aspek Kepemilikan Dokumen	74
4. Tantangan bagi Sistem Manajemen Data Dan Informasi Kependudukan	75
B. Implikasi Kebijakan	76
1. Kebijakan Akurasi dan Validasi Kependudukan	76
2. Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	76
3. Kebijakan Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Berwawasan Kependudukan	76
4. Kebijakan Ketahanan Pangan	76
5. Kebijakan Kesehatan	76

6. Kebijakan Pendidikan	77
7. Kebijakan Ketenagakerjaan	77
8. Kebijakan Sosial	77

DAFTAR TABEL

Tabel. II.1 Perkembangan PDRB Dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surakarta 2012-2016	7
Tabel. II.2 Pembagian Kawasan Ekonomi Kota Surakarta	8
Tabel. IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Laweyan	12
Tabel. IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Serengan	12
Tabel. IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan PasarKliwon	13
Tabel. IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Jebres.....	13
Tabel. IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Banjarsari.....	14
Tabel. IV.6 Rasio Kepadatan Penduduk Perkecamatan	16
Tabel. IV.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Perkecamatan	17
Tabel. IV.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	18
Tabel. IV.9 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016.....	20
Tabel. IV.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin	21
Tabel. IV.11 Angka Perkawinan Kasar Per Kecamatan	23

Tabel. IV.12 Angka Perkawainan Umum Perkecamatan	24
Tabel. IV.13 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin	25
Tabel. IV.14 Persentasi Penduduk Lajang	26
Tabel. IV. 15 Angka Perceraian Kasar Per Kecamatan	27
Tabel. IV.16 Angka Perceraian Umum Per Kecamatan	28
Tabel. IV.17 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Per Kecamatan	29
Tabel. IV.18 Jumlah Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan dalam Keluarga	30
Tabel. IV.19 Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan	31
Tabel. IV.20 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Laweyan	32
Tabel. IV.21 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Serengan.....	33
Tabel. IV.22 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Pasarkliwon	33
Tabel. IV.23 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Jebres	34
Tabel. IV.24 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Banjarsari	34
Tabel. IV.25 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	35
Tabel. IV.26 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan	36
Tabel. IV.27 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	38
Tabel. IV.28 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42

Tabel. IV.29 Jumlah Penduduk Tujuh Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel. IV.30 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan	45
Tabel. IV.31 Jumlah Kelahiran hidup Per Kecamatan	46
Tabel. IV.32 Angka Kelahiran Kasar Perkecamatan	47
Tabel. IV.33 Jumlah Kematian Per Kecamatan	48
Tabel. IV.34 Angka Kematian Kasar Per kecamatan	48
Tabel. V. 1. Rasio Anak dan Perempuan	51
Tabel. V. 2. Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita	52
Tabel. V. 3. Kematian Ibu Hamil dan Pengelolaanya	52
Tabel. V. 4. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Penduduk.....	53
Tabel. V. 5. Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja	54
Tabel. V. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel. V. 7. Angka Penyandang Cacat	59
Tabel. V. 8. Penduduk Keluarga Miskin Penerima PBI BPJS Per Kecamatan	60
Tabel. V. 9. Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Keluarga Miskin Berdasarkan Sumber Pembayaran	60
Tabel. V. 10. Migrasi Keluar/Pindah Tahun 2016.....	61
Tabel. V. 11. Migrasi Masuk/Datang Tahun 2016.....	61

Tabel. V. 12. Angka Migrasi Netto Per Kecamatan	62
Tabel. V. 13. Jumlah Migrasi BRUTO	62
Tabel. VI. 1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Per Kelurahan	64
Tabel. VI. 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	67
Tabel. VI. 3. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Waktu Pelaporan 2016.....	68
Tabel. VI. 4. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	69
Tabel. VI. 5. Jumlah Penerbitan Akta Kematian Perkecamatan	70
Tabel. VI. 6. Jumlah Penerbitan Akta Kematian Menurut Waktu Pelaporan	70
Tabel. VI. 7. Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2016.....	71
Tabel. VI. 8. Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Tahun 2016.....	72
Tabel. VI. 9. Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak Tahun 2016.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar. II. 1 Peta Kota Surakarta	4
Gambar. IV. 1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin	15
Gambar. IV.2. Grafik Kepadatan Penduduk	17
Gambar. IV.3. Piramida Penduduk	20
Gambar. IV.4. Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk	21
Gambar. IV.5. Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	22
Gambar. IV.6. Grafik Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan	31
Gambar. IV.7. Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan	37
Gambar. IV.8. Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Gambar. IV.9. Grafik Jumlah Penduduk Tujuh Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perjalanan suatu bangsa guna mencapai tujuannya, yaitu masyarakat yang sejahtera. Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang utama dalam pembangunan sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kota Surakarta guna memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan di Kota Surakarta.

B. Tujuan

Penyusunan Profil Perkembangan Data Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2016 bertujuan untuk menyajikan data kependudukan serta memberikan informasi mengenai perkembangan kependudukan Kota Surakarta Tahun 2016. Secara umum, Profil Perkembangan Kependudukan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan dan perencanaan tolak ukur kinerja pembangunan daerah. Sedangkan secara khusus pemanfaatan informasi -

perkembangan kependudukan tahun 2016 digunakan sebagai rujukan data untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kota.
2. Perencanaan kebijakan kependudukan daerah

3. Penentuan target kinerja luaran dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program pembangunan *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial.
5. Pengembangan kelembagaan partisipasi pembangunan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta memuat deskripsi data dan analisis implikasi atas data :

1. Kuantitas penduduk, meliputi jumlah dan komposisi beserta persebaran penduduk, penduduk menurut demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP, Akte dan surat keterangan.

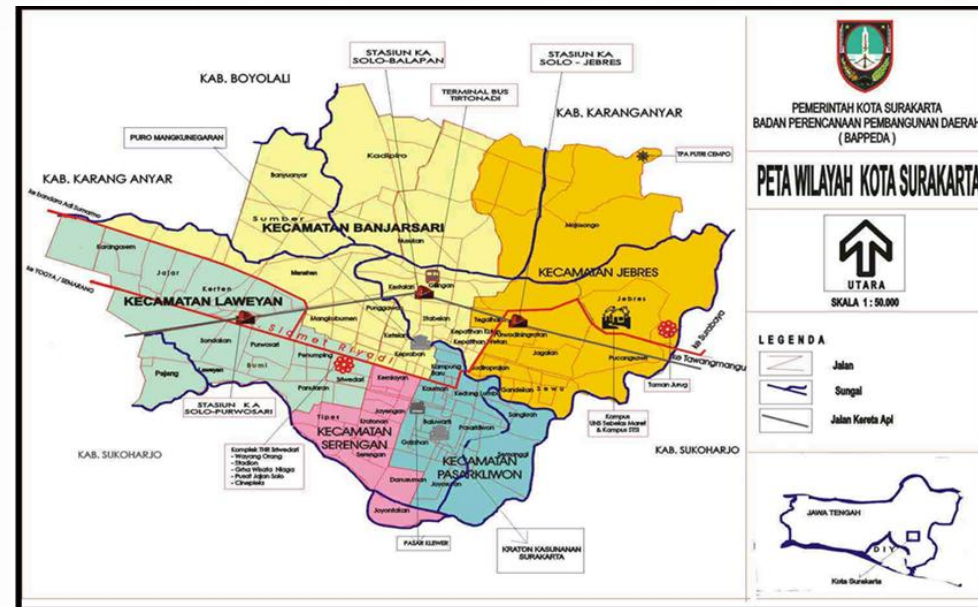
D. Pengertian Umum

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Surakarta.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk Kota Surakarta.
3. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan.
4. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

6. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
7. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
8. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, pindah, datang, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
10. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. Mobilitas penduduk adalah perpindahan keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Bab II

Gambaran Umum Kota Surakarta



Gambar II.1 Peta Kota Surakarta

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 44.04 km², yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 (lima puluh satu) kelurahan, 604 (enam ratus empat) Rukun Warga (RW) serta 2.714 (dua ribu tujuh ratus empat belas) Rukun Tetangga (RT). Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 14,81 km² atau sebesar 33,63% dari luas wilayah Kota Surakarta. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 3,19 km² atau sebesar 7,04% dari luas wilayah Kota Surakarta. Sejarah Kota

Surakarta yang berawal dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang Kyai yang bernama Ki Gedhe Sala, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai Kota Solo. Sejarah diawali dengan rusaknya Keraton Kartasura akibat pemberontakan “Geger Pecinan”, yaitu pemberontakan RM Garendi yang dibantu Adipati Maropuro dan barisan pemberontak Cina. Dengan rusaknya keraton tersebut maka pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Sunan Paku Buwana II menjadi ibukota kerajaan yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat.

Prosesi pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat ke Surakarta dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, tanggal 14 Suro 1670 atau tanggal 17 Pebruari 1745 pada kalender masehi. Dengan demikian secara resmi Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono II bertahta di Keraton Surakarta. Sebagai tonggak sejarah, maka tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sala. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara, selanjutnya dalam perkembangannya Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta. Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kotamadya Surakarta disebut Daerah Tingkat II dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Kota Surakarta.

Kota Surakarta biasanya disebut juga nagari oleh penduduk kabupaten-kabupaten di sekitarnya, karena kota ini dulunya menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada jaman kemerdekaan, Kota Solo menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi pusat Karesidenan karena dihapus oleh Pemerintah. Sampai sekarang sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada dan secara kelembagaan Karesidenan Surakarta sudah diganti dengan Badan Koordinator Wilayah dan masih menjadi pusat budaya maupun spiritual bagi masyarakat “Solo Raya” khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.

Kota Surakarta memiliki banyak potensi di bidang budaya dan ekonomi terutama perdagangan dan jasa. Potensi wisata di Surakarta meliputi wisata sejarah, seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Museum Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, serta event-event wisata yang telah menjadi acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Mangkunegaran Performing Art, Festival Payung, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain.

A. Letak Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta terletak antara 110°45'15" – 110°45'35 Bujur Timur dan 7°36'00" – 7°56'00" Lintang Selatan. Wilayah ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes, Anyar dan Bengawan Solo.

Kota Surakarta berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo .

B. Kondisi Demografis Kota Surakarta

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2016 adalah 570.876 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 282.336 jiwa dan perempuan 288.540 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 97,85%, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur tampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok manula perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya manula perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan manula laki-laki.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 181.006 jiwa dan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Serengan yaitu sebanyak 54.649 jiwa. Kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu mencapai 12.962 jiwa/km², sehingga apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Surakarta akan menjadi semakin padat.

C. Gambaran Ekonomi Kota Surakarta

Produk Domestik Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Berikut table perkembangan PDRB dan Kontribusi Sektor atas Dasar Harga Konstan Kota Surakarta Tahun 2012 – 2016.

Tabel II.1 Perkembangan PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surakarta Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah).

Kategori	Uraian	2012		2013		2014			2015		2016**)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119,290.28	0.49	125,292.13	0.49	127,634.25	0.47	129,926.80	0.46	130,948.34	0.44
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	118,782.94	0.49	124,753.47	0.49	127,112.81	0.47	129,399.81	0.45	130,419.42	0.44
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	7.59	0.00	7.73	0.00	7.56	0.00	7.47	0.00	7.40	0.00
	3 Perikanan	499.74	0.00	530.93	0.00	513.88	0.00	519.52	0.00	521.52	0.00
B	Pertambangan dan Penggalian	564.81	0.00	562.50	0.00	549.59	0.00	535.17	0.00	532.82	0.00
C	Industri Pengolahan	1,874,945.81	7.77	2,044,003.66	7.97	2,184,105.67	8.09	2,263,993.97	7.96	2,347,880.69	7.84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	57,293.50	0.24	61,821.35	0.24	63,499.68	0.24	61,092.81	0.21	65,156.76	0.22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,187.39	0.20	47,384.05	0.18	48,594.69	0.18	49,454.24	0.17	50,640.12	0.17
F	Konstruksi	6,512,554.87	27.00	6,767,584.32	26.40	7,014,333.33	25.99	7,390,395.31	25.97	7,865,547.96	26.25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,764,372.04	23.89	6,193,415.14	24.16	6,461,014.08	23.94	6,730,422.13	23.65	7,036,700.29	23.48
H	Transportasi dan Pergudangan	630,022.97	2.61	695,071.27	2.71	750,350.60	2.78	811,007.78	2.85	853,855.02	2.85

Keterangan **: Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016

Pemahaman sektor andalan adalah sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Berdasarkan data perkembangan PDRB per sektor, dapat dihitung besarnya kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kota Surakarta mengandalkan dari sektor perdagangan, industri, hotel dan restoran, konstruksi, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.

D. Potensi Kota Surakarta

Tabel II.2 Pembagian Kawasan Ekonomi Kota Surakarta

Kawasan	Peruntukan	Wilayah
Kawasan industri rumah tangga	Industri rumah tangga mebel	Kecamatan Jebres
	Industri rumah tangga pembuatan shuttle cock dan gitar	Kecamatan Pasar Kliwon
	Industri pengolahan tahu dan tempe	Kelurahan Mojosongo
	Industri pembuatan sangkar burung	Kelurahan Mojosongo
Kawasan Industri Kreatif	Industri batik	Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Laweyan
Kawasan Pariwisata	Cagar budaya, sejarah & nilai-nilai tradisional	Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pasar Kliwon
	Wisata belanja batik	Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Laweyan
	Wisata Barang Antik	Pasar Antik Triwindu (Kelurahan Keprabon)
	Pariwisata Kuliner	Tersebar di seluruh wilayah Kota Surakarta
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, meliputi : Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern	Pasar tradisional	Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Pajang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pasar Kliwon)

	Pusat perbelanjaan meliputi pengembangan perdagangan skala regional kota	Kelurahan Setabelan-Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kelurahan Panularan.
	Perdagangan grosir dan pasar besar	Kecamatan Laweyan
	Pengembangan kawasan perdagangan berbentuk Ruko	Sepanjang jalan protokol
	Toko modern berupa pengembangan pusat perbelanjaan & toko modern	Wilayah kota yang penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota
Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal	Ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokan PKL oleh Pemerintah Daerah	Kawasan I yaitu Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Kratonan dan Kelurahan Sriwedari-Kecamatan Pasar Kliwon; Kawasan II yaitu di Kelurahan Purwosari-Kecamatan Laweyan; Kawasan III yaitu Kelurahan Jebres, Kelurahan Purwodiningratan, Kawasan IV yaitu Kelurahan Manahan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Nusukan.
	Ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari Corporate Social Responsibility/CSR	
	Ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam	Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto

Bab III Sumber Data

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan disebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari data registrasi, non registrasi dan lintas sektoral.

Data hasil registrasi penduduk merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung- jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut berarti untuk publikasi Profil Perkembangan Kependudukan didasarkan pada DAK2 (Data Agregat Kependudukan Semester 2) dari Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan 2 kali dalam setahun. Bila ada perbedaan data antara DAK2 dengan data di daerah, maka data DAK2 yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan data resmi kependudukan.

Lima hal pokok yang menjadi kerangka berfikir serta dasar metode analisis data dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2016 adalah :

1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga jelas peristiwa kependudukan yang terjadi;
2. Mengidentifikasi segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan;
3. Mengidentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
4. Mendiseminasikan hasil analisis profil kependudukan Kota Surakarta dengan instansi terkait;
5. Mendorong percepatan terwujudnya database penduduk dan analisa untuk pembangunan daerah.

Bab IV

Perkembangan Kuantitas Penduduk

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

1. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Kec. Laweyan

No	Desa/Kelurahan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	33.72.01	LAWEYAN	50.321	17.82%	52.012	18,03%	102.333	17,93%
1	1001	PAJANG	12.227	4.33%	12.519	4,34%	24.746	4,33%
2	1002	LAWEYAN	1.042	0.37%	1.088	0,38%	2.130	0,37%
3	1003	BUMI	3.119	1.10%	3.235	1,12%	6.354	1,11%
4	1004	PANULARAN	4.620	1.64%	4.809	1,67%	9.429	1,65%
5	1005	PENUMPING	1.986	0.70%	2.109	0,73%	4.095	0,72%
6	1006	SRIWEDARI	2.016	0.71%	2.108	0,73%	4.124	0,72%
7	1007	PURWOSARI	5.098	1.81%	5.279	1,83%	10.377	1,82%
8	1008	SONDAKAN	6.015	2.13%	6.235	2,16%	12.250	2,15%
9	1009	KERTEN	4.676	1.66%	4.772	1,65%	9.448	1,66%
10	1010	JAJAR	4.630	1.64%	4.732	1,64%	9.362	1,64%
11	1011	KARANGASEM	4.892	1.73%	5.126	1,78%	10.018	1,75%

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Kec. Serengan

No	Desa/Kelurahan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	33.72.02	SERENGAN	26.827	9.50%	27.822	9,64%	54.649	9,57%
1	1001	JOYOTAKAN	3.849	1.36%	3.913	1,36%	7.762	1,36%
2	1002	DANUKUSUMAN	5.026	1.78%	5.225	1,81%	10.251	1,80%

3	1003	SERENGAN	5.403	1.91%	5.626	1,95%	11.029	1,93%
4	1004	TIPES	5.996	2.12%	6.137	2,13%	12.133	2,13%
5	1005	KRATONAN	2.690	0.95%	2.841	0,98%	5.531	0,97%
6	1006	JAYENGAN	1.995	0.71%	2.113	0,73%	4.108	0,72%
7	1007	KEMLAYAN	1.868	0.66%	1.967	0,68%	3.835	0,67%

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Kec. Pasar Kliwon

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		
Kode	Nama	n	%	n	%	n	%	
33.72.03	PASAR KLIWON	43.222	15.31%	43.457	15,06%	86.679	15,18%	
1	1001	JOYOSURAN	5.367	1.90%	5.462	1,89%	10.829	1,90%
2	1002	SEMANGGI	18.095	6.41%	17.639	6,11%	35.734	6,26%
3	1003	PASAR KLIWON	2.717	0.96%	2.808	0,97%	5.525	0,97%
4	1004	GAJAHAN	1.964	0.70%	2.021	0,70%	3.985	0,70%
5	1005	BALUWARTI	3.208	1.14%	3.408	1,18%	6.616	1,16%
6	1006	KAMPUNG BARU	1.423	0.50%	1.532	0,53%	2.955	0,52%
7	1007	KEDUNG LUMBU	2.716	0.96%	2.830	0,98%	5.546	0,97%
8	1008	SANGKRAH	6.455	2.29%	6.416	2,22%	12.871	2,25%
9	1009	KAUMAN	1.277	0.45%	1.341	0,46%	2.618	0,46%

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Kec. Jebres

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		
Kode	Nama	n	%	n	%	n	%	
33.72.04	JEBRES	72.643	25.73%	73.566	25,50%	146.209	25,61%	
1	1001	KEPATIHAN KULON	1.133	0.40%	1.290	0,45%	2.423	0,42%
2	1002	KEPATIHAN WETAN	1.256	0.44%	1.362	0,47%	2.618	0,46%
3	1003	SUDIROPRAJAN	1.845	0.65%	2.015	0,70%	3.860	0,68%
4	1004	GANDEKAN	4.629	1.64%	4.657	1,61%	9.286	1,63%
5	1005	SEWU	3.627	1.28%	3.637	1,26%	7.264	1,27%
6	1006	PUCANGSAWIT	6.914	2.45%	6.908	2,39%	13.822	2,42%

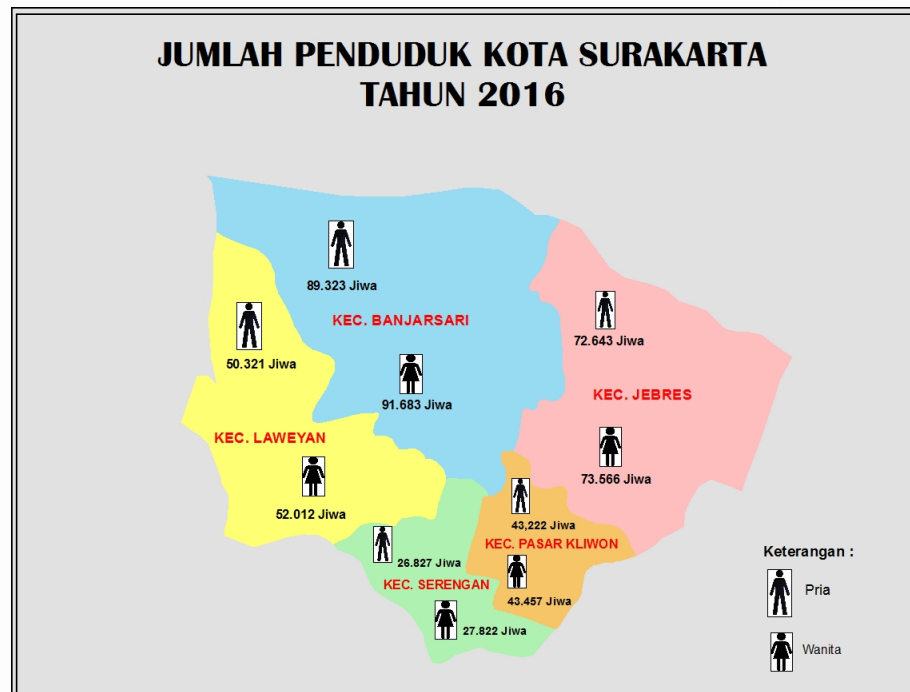
7	1007	JAGALAN	6.032	2.14%	6.162	2,14%	12.194	2,14%
8	1008	PURWODININGRATAN	2.479	0.88%	2.583	0,90%	5.062	0,89%
9	1009	TEGALHARJO	2.442	0.86%	2.574	0,89%	5.016	0,88%
10	1010	JEBRES	16.436	5.82%	16.640	5,77%	33.076	5,79%
11	1011	MOJOSONGO	25.850	9.16%	25.738	8,92%	51.588	9,04%

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Kec. Banjarsari

No		Desa/Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
Kode		Nama	n	%	n	%	n	%
33.72.05		BANJARSARI	89.323	31.64%	91.683	31,77%	181.006	31,71%
1	1001	KADIPIRO	27.575	9.77%	27.784	9,63%	55.359	9,70%
2	1002	NUSUKAN	15.462	5.48%	15.762	5,46%	31.224	5,47%
3	1003	GILINGAN	10.061	3.56%	10.405	3,61%	20.466	3,59%
4	1004	SETABELAN	2.017	0.71%	2.056	0,71%	4.073	0,71%
5	1005	KESTALAN	1.451	0.51%	1.547	0,54%	2.998	0,53%
6	1006	KEPRABON	1.521	0.54%	1.658	0,57%	3.179	0,56%
7	1007	TIMURAN	1.318	0.47%	1.517	0,53%	2.835	0,50%
8	1008	KETELAN	1.725	0.61%	1.808	0,63%	3.533	0,62%
9	1009	PUNGGAWAN	2.089	0.74%	2.200	0,76%	4.289	0,75%
10	1010	MANGKUBUMEN	4.803	1.70%	4.993	1,73%	9.796	1,72%
11	1011	MANAHAN	5.245	1.86%	5.605	1,94%	10.850	1,90%
12	1012	SUMBER	8.919	3.16%	9.178	3,18%	18.097	3,17%
13	1013	BANYUANYAR	7.137	2.53%	7.170	2,48%	14.307	2,51%
Jumlah Total Kota Surakarta			282.336	100,00%	288.540	100,00%	570.876	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Penduduk Kota Surakarta tersebar di 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan suatu wilayah. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sejumlah 181.006 jiwa yang terdiri dari 89.323 laki-laki dan 91.683 perempuan atau 31,71% dari total penduduk, disusul Kecamatan Jebres dengan 25,61%. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Serengan yaitu sejumlah 54.649 Jiwa dimana 26.827 laki-laki dan 27.822 perempuan atau 9,57% dari total penduduk. Proporsi penduduk perempuan disetiap kecamatan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki.



Gambar IV.1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin

2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Tabel IV.6 Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	n	%		
1	33.72.01	LAWEYAN	102.333	17,93%	8,64	11.844,10
2	33.72.02	SERENGAN	54.649	9,57%	3,19	17.131,35
3	33.72.03	PASAR KLIWON	86.679	15,18%	4,82	17.983,20
4	33.72.04	JEBRES	146.209	25,61%	12,58	11.622,34
5	33.72.05	BANJARSARI	181.006	31,71%	14,81	12.221,88
Jumlah			570.876	100,00%	44,04	12.962,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Thn 2016, diolah.

Angka kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km²). Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Angka kepadatan penduduk Kota Surakarta adalah 12.963 artinya setiap km² dihuni oleh 12.693 jiwa. Jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kota Surakarta dengan kepadatan mencapai 17.984 jiwa/km². Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Jebres 11.623 jiwa/km². Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.



Gambar IV. 2 Grafik Kepadatan Penduduk Kota Surakarta

3. Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

Tabel IV.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Sekarang		Jumlah Penduduk Tahun Sebelum		Angka Pertumbuhan Penduduk
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	33.72.01	LAWEYAN	102.333	17,93%	101.045	18,12%	1,27%
2	33.72.02	SERENGAN	54.649	9,57%	54.005	9,69%	1,19%
3	33.72.03	PASAR KLIWON	86.679	15,18%	84.566	15,17%	2,47%
4	33.72.04	JEBRES	146.209	25,61%	142.237	25,51%	2,75%
5	33.72.05	BANJARSARI	181.006	31,71%	175.753	31,52%	2,95%
Jumlah			570.876	100,00%	557.606	100,00%	2,35%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Untuk Kota Surakarta, angka pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan bernilai positif, artinya terdapat penambahan penduduk pada setiap kecamatan dari tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 2,95%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Serengan dengan angka 1,19%. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan dan tingkat pendidikan.

B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Piramida dan Rasio Ketergantungan

Tabel IV.8 Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

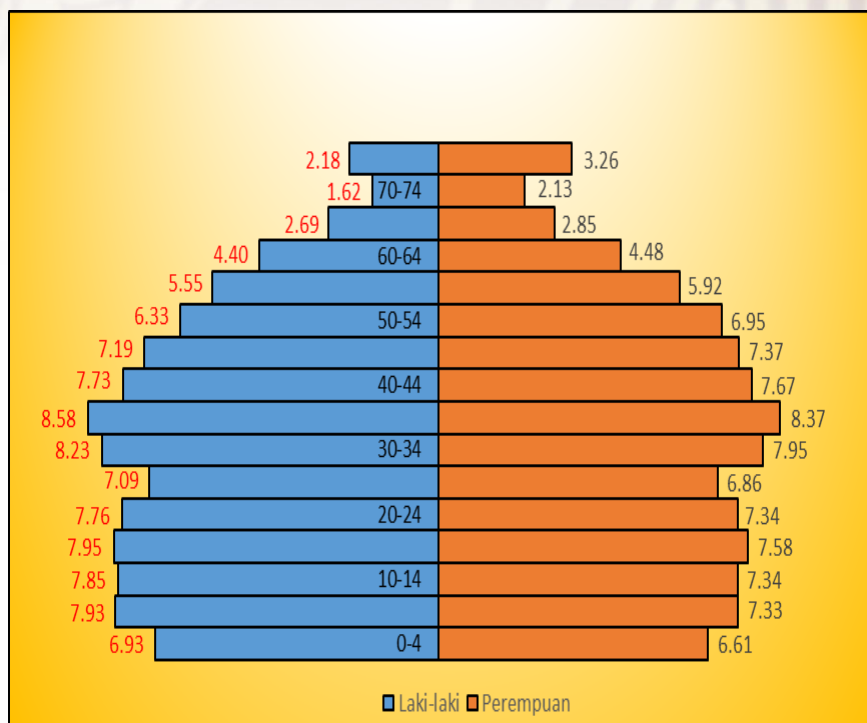
No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	19.579	6.93%	19.059	6,61%	38.638	6,77%
2	5-9	22.377	7.93%	21.148	7,33%	43.525	7,62%
3	10-14	22.170	7.85%	21.180	7,34%	43.350	7,59%
4	15-19	22.438	7.95%	21.885	7,58%	44.323	7,76%
5	20-24	21.897	7.76%	21.166	7,34%	43.063	7,54%
6	25-29	20.011	7.09%	19.783	6,86%	39.794	6,97%
7	30-34	23.238	8.23%	22.947	7,95%	46.185	8,09%
8	35-39	24.226	8.58%	24.149	8,37%	48.375	8,47%
9	40-44	21.815	7.73%	22.144	7,67%	43.959	7,70%
10	45-49	20.312	7.19%	21.260	7,37%	41.572	7,28%
11	50-54	17.876	6.33%	20.050	6,95%	37.926	6,64%

12	55-59	15.657	5.55%	17.089	5,92%	32.746	5,74%
13	60-64	12.414	4.40%	12.917	4,48%	25.331	4,44%
14	65-69	7.582	2.69%	8.230	2,85%	15.812	2,77%
15	70-74	4.578	1.62%	6.135	2,13%	10.713	1,88%
16	>=75	6.166	2.18%	9.398	3,26%	15.564	2,73%
Jumlah		282.336	100,00%	288.540	100,00%	570.876	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk Kota Surakarta, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 282.336 jiwa atau 49,45% dan jumlah penduduk perempuan 288.540 jiwa atau 50,55%. Komposisi umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk.

Pada piramida penduduk Kota Surakarta tahun 2016, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 35-39 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 8,58% dan penduduk perempuan 8,37% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 48.375 jiwa. Adapun komposisi penduduk terkecil berada pada rentang umur 70-74 tahun dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 1,62% dan penduduk perempuan 2,13%.



Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kota Surakarta

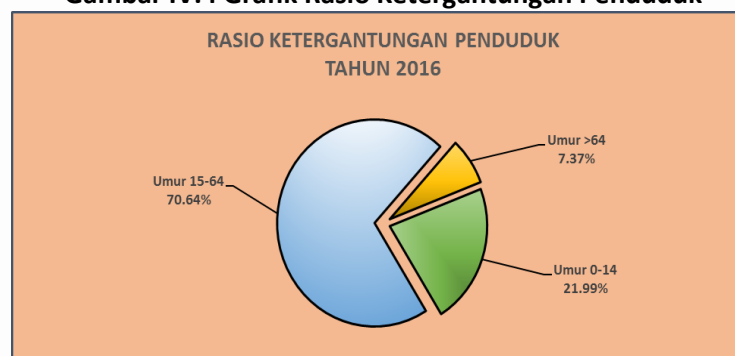
Tabel IV.9 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	64.126	22.71%	61.387	21,28%	125.513	21,99%
2	15-64	199.884	70.80%	203.390	70,49%	403.274	70,64%
3	>64	18.326	6.49%	23.763	8,24%	42.089	7,37%
Jumlah		282.336	100,00%	288.540	100,00%	570.876	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Rasio ketergantungan penduduk digunakan sebagai indikator untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini menunjukkan beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Pada kelompok umur 0-14 tahun adalah kelompok umur yang belum produktif yaitu sebesar 21,99% atau 125.513 anak, dan >64 tahun merupakan kelompok umur yang tidak produktif yaitu sebesar 7,37% atau 42.089 orang. Untuk Kota Surakarta, kelompok umur non produktif tersebut adalah sebesar 29,36%, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 29-30 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif. Adapun kelompok umur produktif di Kota Surakarta adalah sebesar 403.274 orang atau 70,64%.

Gambar IV.4 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk



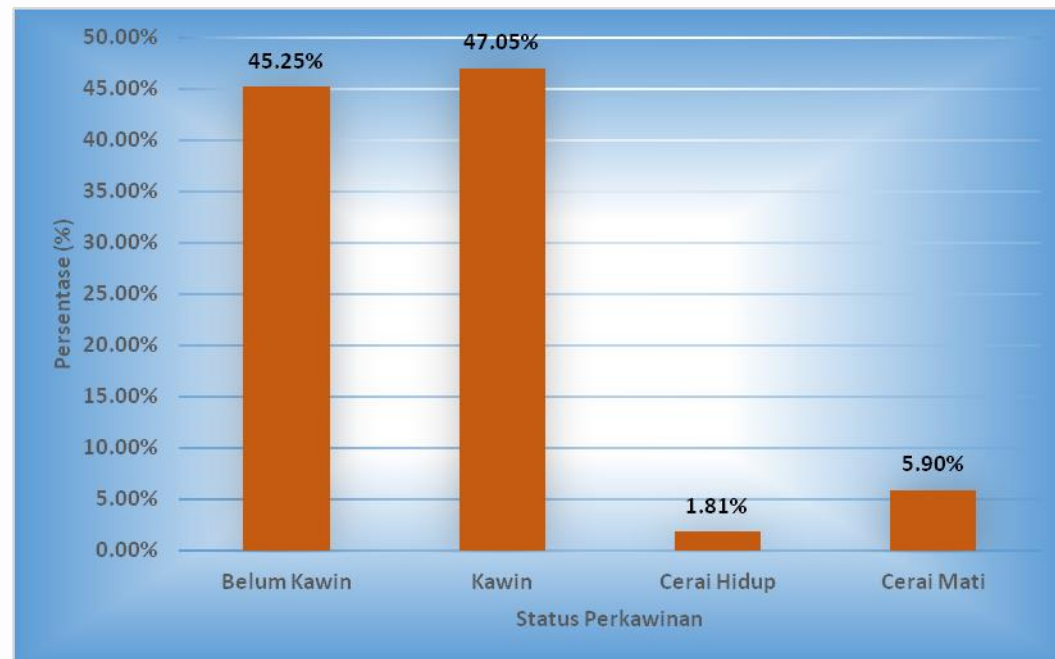
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Kawin

Tabel IV.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	138.188	48.94%	120.113	41,63%	258.301	45,25%
2	Kawin	133.554	47.30%	135.020	46,79%	268.574	47,05%
3	Cerai Hidup	3.962	1.40%	6.368	2,21%	10.330	1,81%
4	Cerai Mati	6.632	2.35%	27.039	9,37%	33.671	5,90%
Jumlah		282.336	100,00%	288.540	100,00%	570.876	100,00%

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada kurun waktu dan wilayah tertentu berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Untuk Kota Surakarta, status kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 47,05% atau 268.574 orang dimana proporsi laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, yang kedua yaitu kategori belum kawin sebesar 45,25% dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk cerai mati prosentasenya sebesar 5,90%. Adapun status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 1,81% atau sebanyak 10.330 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar IV.5 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan



Tabel IV.11 Angka Perkawinan Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk				Angka Perkawinan Kasar
	Kode	Nama	Status Kawin	Tahun Sebelum	Tahun Sekarang	Pertengahan Tahun	
1	33.72.01	LAWEYAN	47.992	101.045	102.333	101.689	471.95
2	33.72.02	SERENGAN	25.523	54.005	54.649	54.327	469.80
3	33.72.03	PASAR KLIWON	40.439	84.566	86.679	85.622	472.30
4	33.72.04	JEBRES	69.860	142.237	146.209	144.223	484.39
5	33.72.05	BANJARSARI	84.760	175.753	181.006	178.380	475.16
Jumlah			268.574	557.606	570.876	564.241	475.99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Pernikahan adalah kemitraan yang mengikat yang disahkan oleh hukum antara dua orang dewasa tanpa adanya paksaan. Di Indonesia pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia minimal 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun di suatu periode tertentu. Untuk Kota Surakarta angka perkawinan kasarnya adalah 475,99 artinya dari 1000 penduduk Kota Surakarta, 476 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk status kawin tanpa memperdulikan urutan perkawinan dan umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang usianya sudah pantas maupun yang belum. Jika dilihat dari setiap kecamatan di Kota Surakarta, Kecamatan Jebres merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 484,39 dibandingkan dengan kecamatan lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kecamatan Serengan yaitu dengan 469.80.

Tabel IV.12 Angka Perkawinan Umum per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Angka Perkawinan Umum
	Kode	Nama	Status Kawin	Umur >= 15	
1	33.72.01	LAWEYAN	47.992	80.107	599,10
2	33.72.02	SERENGAN	25.523	42.960	594,11
3	33.72.03	PASAR KLIWON	40.439	67.086	602,79
4	33.72.04	JEBRES	69.860	114.343	610,97
5	33.72.05	BANJARSARI	84.760	140.867	601,70
Jumlah			268.574	445.363	603,05

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Sama halnya dengan angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembaginya adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya tidak berisiko kawin. Untuk Kota Surakarta, angka perkawinan umum sebesar 603,05 yang artinya dari 1000 penduduk 603 penduduk usia diatas 15 tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di Kecamatan Jebres dengan 610,97 dan yang terendah berada di Kecamatan Serengan dengan 594,11.

Tabel IV.13 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Penduduk Berstatus Kawin			Angka Perkawinan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	15-19	22.438	21.885	44.323	57	368	425	9,59
2	20-24	21.897	21.166	43.063	1.831	4.907	6.738	156,47
3	25-29	20.011	19.783	39.794	7.842	12.779	20.621	518,19
4	30-34	23.238	22.947	46.185	15.738	18.912	34.650	750,24
5	35-39	24.226	24.149	48.375	19.010	20.351	39.361	813,66
6	40-44	21.815	22.144	43.959	17.970	18.445	36.415	828,39
7	45-49	20.312	21.260	41.572	17.446	17.297	34.743	835,73
8	50-54	17.876	20.050	37.926	15.626	15.326	30.952	816,12
9	55-59	15.657	17.089	32.746	13.729	11.795	25.524	779,45
10	60-64	12.414	12.917	25.331	10.665	7.577	18.242	720,15
11	65-69	7.582	8.230	15.812	6.284	3.673	9.957	629,71
12	70-74	4.578	6.135	10.713	3.509	1.956	5.465	510,13
13	>=75	6.166	9.398	15.564	3.846	1.634	5.480	352,09
Jumlah		218.210	227.153	445.363	133.553	135.020	268.573	603,04

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Angka perkawinan spesifik merupakan angka perkawinan berdasarkan umur dan jenis kelamin yaitu menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur dan antar jenis kelamin. Berdasarkan Tabel.IV.9 angka perkawinan spesifik tahun 2016 pada kelompok umur 15-19 tahun, untuk laki-laki adalah 2,54 artinya dari 1000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun, terdapat 2-3 laki-laki yang melakukan perkawinan. Adapun angka perkawinan spesifik untuk perempuan pada kelompok umur yang sama adalah 16,82 artinya dari 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun, terdapat 16-17 anak perempuan yang melakukan perkawinan.

Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan yang melakukan perkawinan usia 15-19 tahun lebih banyak daripada anak laki-laki. Dengan diketahuinya angka perkawinan menurut umur dan jenis kelamin dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk pengembangan program-program yang ditujukan kepada remaja terutama tentang penundaan perkawinan.

Tabel IV.14 Persentase Penduduk Lajang

No	Kelompok Umur	Laki-Laki			Perempuan			Total		
		Belum Kawin	Jumlah Penduduk	% Lajang	Belum Kawin	Jumlah Penduduk	% Lajang	Belum Kawin	Jumlah Penduduk	% Lajang
1	15-19	22.381	22.438	99.75%	21.515	21.885	98.31%	43.896	44.323	99.04%
2	20-24	20.041	21.897	91.52%	16.143	21.166	76.27%	36.184	43.063	84.03%
3	25-29	11.957	20.011	59.75%	6.591	19.783	33.32%	18.548	39.794	46.61%
4	30-34	7.001	23.238	30.13%	3.174	22.947	13.83%	10.175	46.185	22.03%
5	35-39	4.470	24.226	18.45%	2.433	24.149	10.07%	6.903	48.375	14.27%
6	40-44	3.054	21.815	14.00%	2.029	22.144	9.16%	5.083	43.959	11.56%
7	45-49	1.967	20.312	9.68%	1.837	21.260	8.64%	3.804	41.572	9.15%
8	50-54	1.266	17.876	7.08%	1.635	20.050	8.15%	2.901	37.926	7.65%
Jumlah		72.137	171.813	41,99%	55.357	173.384	31,93%	127.494	345.197	36,93%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Keadaan dimana seorang laki-laki ataupun perempuan berstatus belum pernah menikah atau belum berumah tangga dinamakan lajang. Terdapat 127.494 jiwa yang belum pernah menikah atau berstatus lajang di kota Surakarta. Persentase lajang tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dengan angka 99,04%, hal itu dipicu karena pada kelompok umur tersebut belum matang untuk melakukan pernikahan dan menjadi kepala keluarga. Pada kelompok umur 50-54 menjadi persentase lajang terendah dengan angka 2.901 jiwa atau 7,65%. Persentase Laki-Laki lajang (41,99%) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Perempuan lajang (31,93%).

Tabel IV.15 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk				Angka Perceraian Kasar
	Kode	Nama	Status Cerai Hidup	Tahun Sebelum	Tahun Sekarang	Pertengahan Tahun	
1	33.72.01	LAWEYAN	1.884	101.045	102.333	101.689	18,53
2	33.72.02	SERENGAN	1.017	54.005	54.649	54.327	18,72
3	33.72.03	PASAR KLIWON	1.617	84.566	86.679	85.622	18,88
4	33.72.04	JEBRES	2.576	142.237	146.209	144.223	17,86
5	33.72.05	BANJARSARI	3.236	175.753	181.006	178.380	18,14
Jumlah			10.330	557.606	570.876	564.241	18,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Angka perceraian kasar menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai status cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Adanya perceraian dapat mengurangi fertilitas. Secara keseluruhan ada sebanyak 18,30 yang artinya terdapat perceraian sebanyak 18 perseribu penduduk pada tahun 2016 di kota Surakarta. Angka perceraian kasar terendah berada di kecamatan Jebres dengan angka 17,86 yang berarti terdapat 17-18 perceraian perseribu penduduk pada tahun 2016. Pada empat kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Banjarsari terjadi 18-19 kali perceraian perseribu penduduk pada tahun 2016.

Tabel IV.16 Angka Perceraian Umum per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Angka Perceraian Umum
	Kode	Nama	Status Cerai Hidup	Umur >= 15	
1	33.72.01	LAWEYAN	1.884	80.107	23,52
2	33.72.02	SERENGAN	1.017	42.960	23,67
3	33.72.03	PASAR KLIWON	1.617	67.086	24,10
4	33.72.04	JEBRES	2.576	114.343	22,53
5	33.72.05	BANJARSARI	3.236	140.867	22,97
Jumlah			10.330	445.363	23,19

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Angka perceraian umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Informasi dari data tersebut digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan, karena pada umumnya usia tersebut belum termasuk usia pernikahan dan mereka tidak beresiko cerai. Angka perceraian umum di kota Surakarta sebesar 23,19 artinya dari seribu penduduk terdapat 23-24 perceraian pada tahun 2016. Kecamatan Pasar Kliwon memiliki angka perceraian tertinggi 24,10 yang berarti terdapat 24-25 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2016. Pada kecamatan Laweyan ada 23-24 perceraian yang terjadi dari seribu penduduk pada tahun 2016, di Kecamatan Serengan dari seribu penduduk terdapat perceraian sebanyak 23-24 perceraian pada tahun 2016. Angka perceraian umum di Kecamatan Jebres 22,53 yang berarti terdapat 22-23 perceraian perseribu penduduk pada tahun 2016, sedangkan dari seribu penduduk di Kecamatan Banjarsari terjadi 22-23 perceraian pada tahun 2016.

3. Profil Kependudukan dari Aspek Keluarga

Tabel IV.17 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Jumlah Keluarga		Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	33.72.01	LAWEYAN	102.333	17.93%	32.233	17,90%	3,17
2	33.72.02	SERENGAN	54.649	9.57%	17.787	9,88%	3,07
3	33.72.03	PASAR KLIWON	86.679	15.18%	27.230	15,13%	3,18
4	33.72.04	JEBRES	146.209	25.61%	46.396	25,77%	3,15
5	33.72.05	BANJARSARI	181.006	31.71%	56.381	31,32%	3,21
Jumlah			570.876	100,00%	180.027	100,00%	3,17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain atau dinamakan pernikahan. Keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kesejahteraan sosial. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari sudut pandang banyaknya anggota keluarga.

Kepala keluarga di Kota Surakarta tersebar di lima kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Nilai rata-rata jumlah anggota keluarga di kota Surakarta sebesar 3,17 artinya pada setiap keluarga rata-rata terdiri dari 3 orang. Berdasarkan data diatas, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap kecamatan yang ada di kota Surakarta terdiri dari 3 orang.

Tabel IV.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga

No	SHDK	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	143.010	50.65%	37.046	12,84%	180.056	31,54%
2	Suami	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Istri	0	0.00%	126.069	43,69%	126.069	22,08%
4	Anak	127.898	45.30%	110.968	38,46%	238.866	41,84%
5	Menantu	185	0.07%	227	0,08%	412	0,07%
6	Cucu	3.040	1.08%	2.795	0,97%	5.835	1,02%
7	Orang Tua	324	0.11%	2.165	0,75%	2.489	0,44%
8	Mertua	184	0.06%	1.180	0,41%	1.364	0,24%
9	Famili Lain	6.519	2.31%	6.943	2,41%	13.462	2,36%
10	Pembantu	9	0.00%	61	0,02%	70	0,01%
11	Lainnya	1.166	0.41%	1.087	0,38%	2.253	0,39%
Jumlah		282.335	100,00%	288.541	100,00%	570.876	100,00%

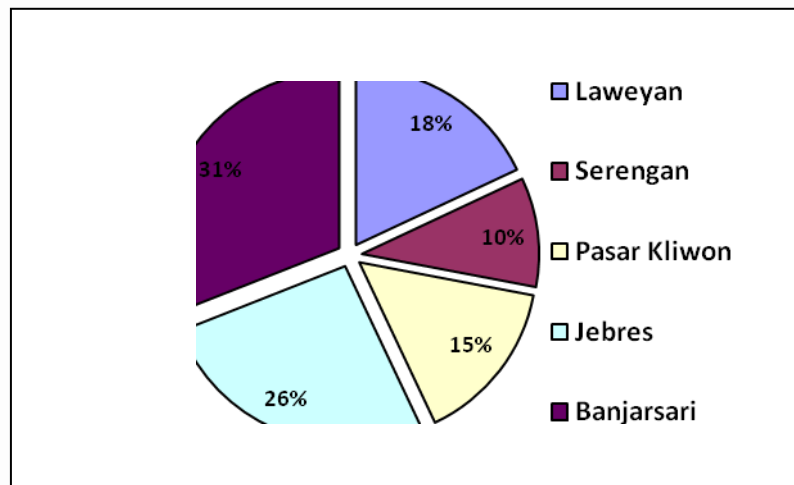
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Status hubungan dalam keluarga digunakan untuk mengetahui posisi anggota keluarga dengan kepala keluarga. Dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga status terbesar adalah anak yaitu sebanyak 238.886 jiwa atau sebesar 41,84%, dengan jumlah anak laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 127.898 jiwa dibandingkan dengan anak perempuan yaitu sebesar 110.968 jiwa.

Tabel IV.19 Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	33.72.01	LAWEYAN	25.473	17.81%	6.760	18,25%	32.233	17,90%
2	33.72.02	SERENGAN	13.782	9.64%	4.005	10,81%	17.787	9,88%
3	33.72.03	PASAR KLIWON	21.502	15.04%	5.728	15,47%	27.230	15,13%
4	33.72.04	JEBRES	37.362	26.13%	9.034	24,39%	46.396	25,77%
5	33.72.05	BANJARSARI	44.870	31.38%	11.511	31,08%	56.381	31,32%
Jumlah			142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.



Gambar IV.6 Grafik Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan

Wilayah kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Tabel IV.20 menunjukkan banyaknya kepala keluarga yang ada di lima wilayah kecamatan di kota Surakarta. Ada sebanyak 180.027 jiwa kepala keluarga yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kota Surakarta. Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Laweyan ada 32.233 kepala keluarga, Kecamatan Serengan ada 17.787 kepala keluarga, Kecamatan Pasar Kliwon ada 27.230 kepala keluarga, Kecamatan Jebres ada 46.396, dan Kecamatan Banjarsari ada 56.381 kepala keluarga. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari, sedangkan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terendah berada di Kecamatan Serengan.

Tabel IV.20 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Laweyan

No	Desa/Kelurahan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	33.72.01	LAWEYAN	25.473	17.81%	6.760	18,25%	32.233	17,90%
1	1001	PAJANG	6.230	4.36%	1.469	3,97%	7.699	4,28%
2	1002	LAWEYAN	534	0.37%	167	0,45%	701	0,39%
3	1003	BUMI	1.561	1.09%	451	1,22%	2.012	1,12%
4	1004	PANULARAN	2.351	1.64%	665	1,80%	3.016	1,68%
5	1005	PENUMPING	989	0.69%	344	0,93%	1.333	0,74%
6	1006	SRIWEDARI	975	0.68%	332	0,90%	1.307	0,73%
7	1007	PURWOSARI	2.580	1.80%	740	2,00%	3.320	1,84%
8	1008	SONDAKAN	3.045	2.13%	837	2,26%	3.882	2,16%
9	1009	KERTEN	2.348	1.64%	657	1,77%	3.005	1,67%
10	1010	JAJAR	2.345	1.64%	576	1,56%	2.921	1,62%
11	1011	KARANGASEM	2.515	1.76%	522	1,41%	3.037	1,69%

Tabel IV.21 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Serengan

No		Desa/Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Nama	n	%	n	%	n	%
33.72.02		SERENGAN	13.782	9.64%	4.005	10,81%	17.787	9,88%
1	1001	JOYOTAKAN	1.955	1.37%	514	1,39%	2.469	1,37%
2	1002	DANUKUSUMAN	2.514	1.76%	790	2,13%	3.304	1,84%
3	1003	SERENGAN	2.811	1.97%	832	2,25%	3.643	2,02%
4	1004	TIPES	3.147	2.20%	823	2,22%	3.970	2,21%
5	1005	KRATONAN	1.371	0.96%	434	1,17%	1.805	1,00%
6	1006	JAYENGAN	1.027	0.72%	299	0,81%	1.326	0,74%
7	1007	KEMLAYAN	957	0.67%	313	0,85%	1.270	0,71%

Tabel IV.22 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Pasar Kliwon

No		Desa/Kelurahan	Laki-Laki Perempuan		Perempuan		Jumlah	
		Nama	n	%	n	%	n	%
33.72.03		PASAR KLIWON	21.502	15.04%	5.728	15,47%	27.230	15,13%
1	1001	JOYOSURAN	2.726	1.91%	762	2,06%	3.488	1,94%
2	1002	SEMANGGI	8.792	6.15%	2.096	5,66%	10.888	6,05%
3	1003	PASAR KLIWON	1.306	0.91%	419	1,13%	1.725	0,96%
4	1004	GAJAHAN	975	0.68%	299	0,81%	1.274	0,71%
5	1005	BALUWARTI	1.626	1.14%	481	1,30%	2.107	1,17%
6	1006	KAMPUNG BARU	736	0.51%	237	0,64%	973	0,54%
7	1007	KEDUNG LUMBU	1.380	0.97%	419	1,13%	1.799	1,00%
8	1008	SANGKRAH	3.344	2.34%	805	2,17%	4.149	2,30%
9	1009	KAUMAN	617	0.43%	210	0,57%	827	0,46%

Tabel IV.23 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Jebres

No		Desa/Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Nama	n	%	n	%	n	%
33.72.04		JEBRES	37.362	26.13%	9.034	24,39%	46.396	25,77%
1	1001	KEPATIHAN KULON	603	0.42%	219	0,59%	822	0,46%
2	1002	KEPATIHAN WETAN	651	0.46%	215	0,58%	866	0,48%
3	1003	SUDIROPRAJAN	931	0.65%	396	1,07%	1.327	0,74%
4	1004	GANDEKAN	2.363	1.65%	662	1,79%	3.025	1,68%
5	1005	SEWU	1.874	1.31%	487	1,31%	2.361	1,31%
6	1006	PUCANGSAWIT	3.589	2.51%	782	2,11%	4.371	2,43%
7	1007	JAGALAN	3.076	2.15%	907	2,45%	3.983	2,21%
8	1008	PURWODININGRATAN	1.260	0.88%	424	1,14%	1.684	0,94%
9	1009	TEGALHARJO	1.234	0.86%	395	1,07%	1.629	0,90%
10	1010	JEBRES	8.516	5.96%	1.947	5,26%	10.463	5,81%
11	1011	MOJOSONGO	13.265	9.28%	2.600	7,02%	15.865	8,81%

Tabel IV.24 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Banjarsari

No		Desa/Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Nama	n	%	n	%	n	%
33.72.05		BANJARSARI	44.870	31.38%	11.511	31,08%	56.381	31,32%
1	1001	KADIPIRO	13.739	9.61%	2.780	7,51%	16.519	9,18%
2	1002	NUSUKAN	7.930	5.55%	2.145	5,79%	10.075	5,60%
3	1003	GILINGAN	5.066	3.54%	1.519	4,10%	6.585	3,66%
4	1004	SETABELAN	995	0.70%	331	0,89%	1.326	0,74%
5	1005	KESTALAN	752	0.53%	246	0,66%	998	0,55%
6	1006	KEPRABON	731	0.51%	272	0,73%	1.003	0,56%
7	1007	TIMURAN	676	0.47%	259	0,70%	935	0,52%

8	1008	KETELAN	854	0.60%	292	0,79%	1.146	0,64%
9	1009	PUNGGAWAN	1.067	0.75%	338	0,91%	1.405	0,78%
10	1010	MANGKUBUMEN	2.401	1.68%	761	2,05%	3.162	1,76%
11	1011	MANAHAN	2.619	1.83%	831	2,24%	3.450	1,92%
12	1012	SUMBER	4.509	3.15%	1.076	2,91%	5.585	3,10%
13	1013	BANYUANYAR	3.531	2.47%	661	1,78%	4.192	2,33%
Jumlah Total Kota Surakarta			142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Informasi yang ada pada data Jumlah Kepala Keluarga per Desa/Kelurahan menunjukkan banyaknya jumlah kepala keluarga di setiap desa atau kelurahan di Kota Surakarta. Terdapat 51 desa/kelurahan yang tersebar di Kota Surakarta. Jumlah kepala keluarga di Kota Surakarta ada sebanyak 180.027 jiwa yang tersebar di 51 kelurahan dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 142.989 jiwa dan kepala keluarga perempuan ada 37.038 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarga terbesar berada di Kelurahan Kadapiro yang terletak di Kecamatan Banjarsari dengan angka 16.519 jiwa atau ada 9,18%, sedangkan jumlah kepala keluarga terendah berada di Kelurahan Laweyan yang terletak di kecamatan Laweyan dengan angka 701 jiwa atau ada 0,39%.

Tabel IV.25 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
2	5-9	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
3	10-14	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
4	15-19	74	0.05%	30	0,08%	104	0,06%
5	20-24	1.888	1.32%	221	0,60%	2.109	1,17%
6	25-29	7.915	5.54%	604	1,63%	8.519	4,73%
7	30-34	16.006	11.19%	1.217	3,29%	17.223	9,57%
8	35-39	19.333	13.52%	1.802	4,87%	21.135	11,74%
9	40-44	18.507	12.94%	2.365	6,39%	20.872	11,59%

10	45-49	18.192	12.72%	2.989	8,07%	21.181	11,77%
11	50-54	16.659	11.65%	4.056	10,95%	20.715	11,51%
12	55-59	14.985	10.48%	4.877	13,17%	19.862	11,03%
13	60-64	12.008	8.40%	4.971	13,42%	16.979	9,43%
14	65-69	7.315	5.12%	4.094	11,05%	11.409	6,34%
15	70-74	4.394	3.07%	3.664	9,89%	8.058	4,48%
16	>=75	5.713	4.00%	6.148	16,60%	11.861	6,59%
Jumlah		142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%

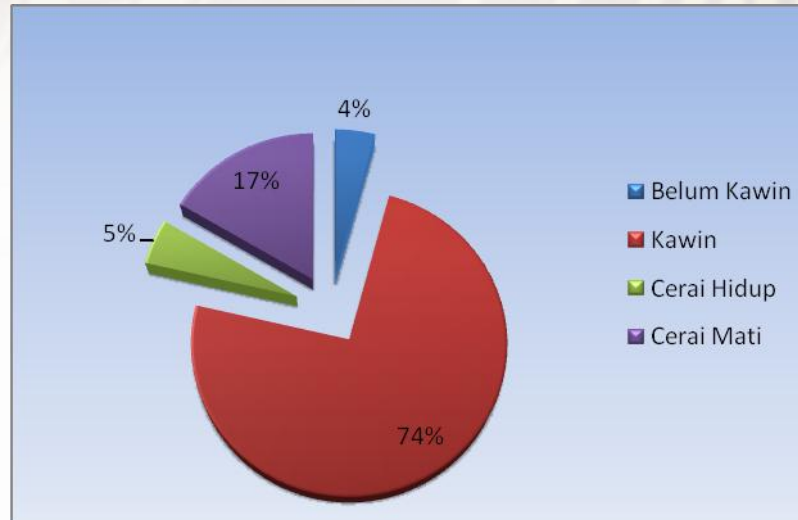
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Informasi yang terdapat pada data jumlah kepala keluarga berdasarkan kelompok umur dapat digunakan untuk mengetahui gambaran keadaan sosial dan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh laki-laki ataupun perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga tertinggi berada pada umur 45-49 yaitu sebanyak 21.181 jiwa atau ada 11,77%. Jumlah kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki tertinggi berada pada umur 35-39 sebanyak 19.333 jiwa (13,52%), sedangkan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi berada pada umur >=75 dengan angka sebesar 6.148 jiwa (16,60%). Kepala keluarga terendah berada pada umur 15-19 dengan angka 104 atau ada 0,06%. Ada sebanyak 11.861 atau 6,59% kepala keluarga yang berumur >=75, hal itu dapat menunjukkan bahwa angka harapan hidup kepala keluarga di Kota Surakarta tergolong tinggi.

Tabel IV.26 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	3.511	2.46%	4.119	11,12%	7.630	4,24%
2	Kawin	129.852	90.81%	4.008	10,82%	133.860	74,36%
3	Cerai Hidup	3.431	2.40%	5.348	14,44%	8.779	4,88%
4	Cerai Mati	6.195	4.33%	23.563	63,62%	29.758	16,53%
Jumlah		142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.



Gambar IV. 7 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

Kepala keluarga merupakan seseorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Informasi yang disajikan pada data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kepala keluarga yang berstatus belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

Berdasarkan data tersebut terlihat ada sebanyak 180.027 kepala keluarga di kota Surakarta dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 142.989 dan ada 37.038 kepala keluarga perempuan. Hal itu menunjukkan kepala keluarga yang dikepalai oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Sebanyak 129.852 atau 90,82% kepala keluarga berstatus kawin. Kepala keluarga dengan angka terkecil yaitu cerai hidup ada 8.779 atau ada 4,88%. Perbedaan mencolok terlihat pada proporsi jenis kelamin perbandingan jumlah kepala keluarga dengan status cerai mati, sebanyak 6.195 atau ada 2,40% kepala keluarga laki-laki dan disusul dengan kepala keluarga perempuan 23.563 atau ada 63,62% yang terbilang lebih banyak dibanding kepala keluarga laki-laki dengan status cerai mati. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa perempuan bisa bertahan menjadi kepala keluarga setelah ditinggal mati suami.

Tabel IV.27 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	1.822	1.27%	2.352	6,35%	4.174	2,32%
2	Mengurus Rumah Tangga	0	0.00%	11.905	32,09%	11.905	6,61%
3	Pelajar/Mahasiswa	336	0.23%	130	0,35%	466	0,26%
4	Pensiunan	4.999	3.50%	2.267	6,12%	7.266	4,04%
5	Pegawai Negeri Sipil	5.625	3.93%	636	1,72%	6.261	3,48%
6	Tentara Nasional Indonesia	726	0.51%	7	0,02%	733	0,41%
7	Kepolisian RI	843	0.59%	13	0,04%	856	0,48%
8	Perdagangan	1.192	0.83%	344	0,93%	1.536	0,85%
9	Petani/Pekebun	126	0.09%	20	0,05%	146	0,08%
10	Peternak	31	0.02%	1	0,00%	32	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	7	0.00%	1	0,00%	8	0,00%
12	Industri	82	0.06%	6	0,02%	88	0,05%
13	Konstruksi	91	0.06%	0	0,00%	91	0,05%
14	Transportasi	154	0.11%	2	0,01%	156	0,09%
15	Karyawan Swasta	78.081	54.61%	9.329	25,19%	87.410	48,55%
16	Karyawan BUMN	902	0.63%	26	0,07%	928	0,52%
17	Karyawan BUMD	133	0.09%	9	0,02%	142	0,08%
18	Karyawan Honorer	350	0.24%	26	0,07%	376	0,21%
19	Buruh Harian Lepas	12.403	8.67%	2.753	7,43%	15.156	8,42%
20	Buruh Tani/Perkebunan	84	0.06%	10	0,03%	94	0,05%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	2	0.00%	1	0,00%	3	0,00%
22	Buruh Peternakan	13	0.01%	1	0,00%	14	0,01%
23	Pembantu Rumah Tangga	6	0.00%	108	0,29%	114	0,06%
24	Tukang Cukur	26	0.02%	0	0,00%	26	0,01%

25	Tukang Listrik	77	0.05%	0	0,00%	77	0,04%
26	Tukang Batu	332	0.23%	0	0,00%	332	0,18%
27	Tukang Kayu	210	0.15%	0	0,00%	210	0,12%
28	Tukang Sol Sepatu	16	0.01%	0	0,00%	16	0,01%
29	Tukang Las/Pandai Besi	127	0.09%	0	0,00%	127	0,07%
30	Tukang Jahit	209	0.15%	214	0,58%	423	0,23%
31	Tukang Gigi	2	0.00%	0	0,00%	2	0,00%
32	Penata Rias	2	0.00%	19	0,05%	21	0,01%
33	Penata Busana	3	0.00%	1	0,00%	4	0,00%
34	Penata Rambut	12	0.01%	10	0,03%	22	0,01%
35	Mekanik	281	0.20%	0	0,00%	281	0,16%
36	Seniman	198	0.14%	18	0,05%	216	0,12%
37	Tabib	4	0.00%	1	0,00%	5	0,00%
38	Paraji	0	0.00%	8	0,00%	8	0,00%
39	Perancang Busana	2	0.00%	0	0,00%	2	0,00%
40	Penterjemah	5	0.00%	0	0,00%	5	0,00%
41	Imam Mesjid	10	0.01%	0	0,00%	10	0,01%
42	Pendeta	236	0.17%	17	0,05%	253	0,14%
43	Pastor	8	0.01%	0	0,00%	8	0,00%
44	Wartawan	68	0.05%	1	0,00%	69	0,04%
45	Ustadz/Mubaligh	20	0.01%	0	0,00%	20	0,01%
46	Juru Masak	20	0.01%	15	0,04%	35	0,02%
47	Promotor Acara	2	0.00%	0	0,00%	2	0,00%
48	Anggota DPR-RI	1	0.00%	0	0,00%	1	0,00%
49	Anggota DPD	0	0.00%	1	0,00%	1	0,00%
50	Anggota BPK	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%

51	Presiden	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
52	Wakil Presiden	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
54	Anggota Kabinet/ Kementerian	1	0.00%	0	0,00%	1	0,00%
55	Duta Besar	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
56	Gubernur	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
57	Wakil Gubernur	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
58	Bupati	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
59	Wakil Bupati	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
60	Walikota	1	0.00%	0	0,00%	1	0,00%
61	Wakil Walikota	1	0.00%	0	0,00%	1	0,00%
62	Anggota DPRD Provinsi	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	10	0.01%	1	0,00%	11	0,01%
64	Dosen	648	0.45%	82	0,22%	730	0,41%
65	Guru	1.671	1.17%	449	1,21%	2.120	1,18%
66	Pilot	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
67	Pengacara	57	0.04%	9	0,02%	66	0,04%
68	Notaris	35	0.02%	8	0,02%	43	0,02%
69	Arsitek	52	0.04%	0	0,00%	52	0,03%
70	Akuntan	5	0.00%	0	0,00%	5	0,00%
71	Konsultan	61	0.04%	2	0,01%	63	0,03%
72	Dokter	437	0.31%	37	0,10%	474	0,26%
73	Bidan	0	0.00%	13	0,04%	13	0,01%
74	Perawat	78	0.05%	33	0,09%	111	0,06%
75	Apoteker	27	0.02%	12	0,03%	39	0,02%

76	Psikiater/Psikolog	5	0.00%	0	0,00%	5	0,00%
77	Penyiar Televisi	1	0.00%	0	0,00%	1	0,00%
78	Penyiar Radio	5	0.00%	0	0,00%	5	0,00%
79	Pelaut	70	0.05%	0	0,00%	70	0,04%
80	Peneliti	5	0.00%	0	0,00%	5	0,00%
81	Sopir	878	0.61%	0	0,00%	878	0,49%
82	Pialang	2	0.00%	0	0,00%	2	0,00%
83	Paranormal	4	0.00%	0	0,00%	4	0,00%
84	Pedagang	3.214	2.25%	1.427	3,85%	4.641	2,58%
85	Perangkat Desa	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
86	Kepala Desa	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
87	Biarawati	0	0.00%	22	0,05%	22	0,01%
88	Wiraswasta	25.531	17.86%	4.645	12,54%	30.176	16,76%
89	Lainnya	275	0.19%	82	0,22%	355	0,20%
Jumlah		142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah

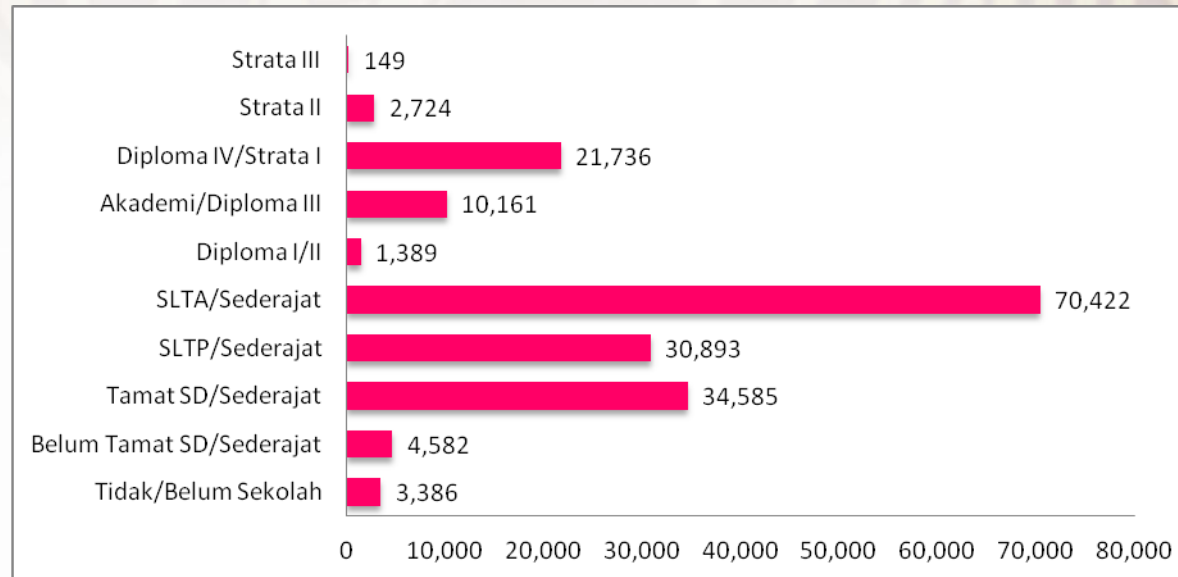
Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Hal tersebut menjadikan informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Kepala keluarga persentase telah bekerja dalam pekerjaan formal maupun informal. Persentase terbesar pekerjaan kepala keluarga yaitu karyawan swasta yaitu 48,55 % dan Wiraswasta sebesar 16,76 % dan buruh harian lepas 8,42 %. Untuk kelompok perempuan proporsi terbesar adalah mengurus rumah tangga yaitu 6,61 %. Data tersebut mengindikasikan bahwa peran usaha swasta di Kota Surakarta sangat berkontribusi pada pembentukan pendapatan perkapita penduduk Kota Surakarta.

Dengan demikian sektor industri kecil dan perdagangan masih sebagai lahan penyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk Kota Surakarta.

Tabel IV.28 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	989	0.69%	2.397	6,47%	3.386	1,88%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.465	1.72%	2.117	5,72%	4.582	2,55%
3	Tamat SD/Sederajat	23.325	16.31%	11.260	30,40%	34.585	19,21%
4	SLTP/Sederajat	24.350	17.03%	6.543	17,67%	30.893	17,16%
5	SLTA/Sederajat	59.621	41.70%	10.801	29,16%	70.422	39,12%
6	Diploma I/II	1.186	0.83%	203	0,55%	1.389	0,77%
7	Akademi/Diploma III	8.839	6.18%	1.322	3,57%	10.161	5,64%
8	Diploma IV/Strata I	19.592	13.70%	2.144	5,79%	21.736	12,07%
9	Strata II	2.480	1.73%	244	0,66%	2.724	1,51%
10	Strata III	142	0.10%	7	0,02%	149	0,08%
Jumlah		142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.



Gambar IV.8 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan kepala keluarga mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Jenjang pendidikan terakhir dapat menjadi salah satu faktor kepala keluarga untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi keperluan hidup keluarga. Semakin tinggi pendidikan kepala keluarga, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan data tersebut terdapat 70.422 jiwa atau 39,12% kepala keluarga jenjang pendidikan terakhir SLTA/Sederajat. Angka tersebut didominasi oleh laki-laki dengan angka 59.621 (41,7%) yang lebih banyak dibanding perempuan dengan angka 10.801 (29,16%). Informasi yang ada menunjukkan bahwa kepala keluarga laki-laki lebih berpotensi mempunyai kesejahteraan keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan dikepalai oleh perempuan.

Program pemerintah telah mewajibkan pendidikan selama sembilan tahun, namun jenjang pendidikan terakhir dibawah SLTP/Sederajat masih terbilang cukup banyak yaitu 40.80%. Jenjang pendidikan terakhir kepala keluarga yang rendah mengindikasi pendapatan yang juga rendah, sehingga mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

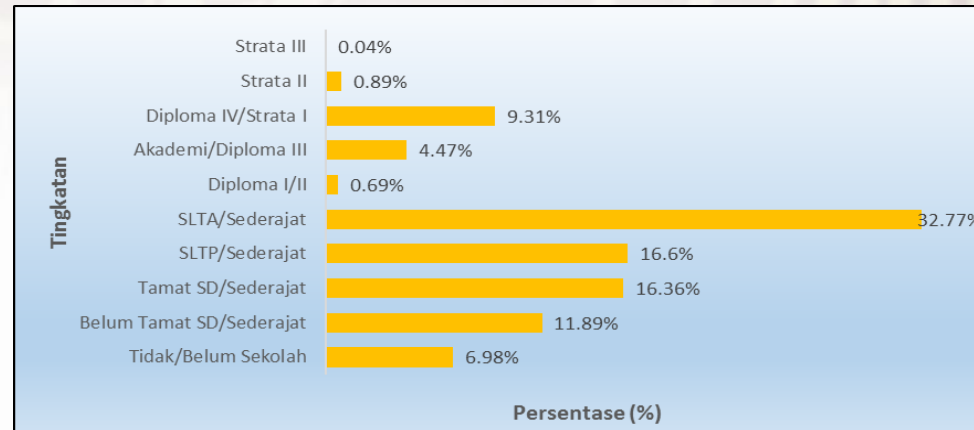
4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Tabel IV.29 Jumlah Penduduk Tujuh Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kabupaten/Kota : 33.72 KOTA SURAKARTA							
No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	16.937	6.67%	19.024	7,29%	35.961	6,98%
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	30.133	11.87%	31.082	11,91%	61.215	11,89%
3	Tamat SD/Sederajat	36.856	14.51%	47.391	18,15%	84.247	16,36%
4	SLTP/Sederajat	43.070	16.96%	42.433	16,25%	85.503	16,60%
5	SLTA/Sederajat	86.987	34.25%	81.794	31,33%	168.781	32,77%
6	Diploma I/II	1.520	0.60%	2.026	0,78%	3.546	0,69%
7	Akademi/Diploma III	11.003	4.33%	12.003	4,60%	23.006	4,47%
8	Diploma IV/Strata I	24.560	9.67%	23.407	8,97%	47.967	9,31%
9	Strata II	2.728	1.07%	1.864	0,71%	4.592	0,89%
10	Strata III	152	0.06%	55	0,02%	207	0,04%
Jumlah		253.946	100,00%	261.079	100,00%	515.025	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Pada Tabel.IV.21 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kota Surakarta adalah pada jenjang SLTA/Sederajat yaitu 32,77% dimana persentase penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan tenaga kerja dengan kriteria minimal pendidikan SLTA/Sederajat menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut sehingga jumlah penduduk pada tingkat pendidikan SLTA/Sederajat tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, kemudian disusul SLTP/Sederajat



Gambar IV.9 Grafik Jumlah Penduduk Tujuh Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan 16,60% dengan persentase laki-laki dan perempuan yang hampir sama. Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit pula perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya.

Tabel IV.30 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

Kabupaten/Kota : 33.72 KOTA SURAKARTA							
No	Agama	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	222.562	78.83%	223.832	77,57%	446.394	78,19%
2	Kristen	38.890	13.77%	42.061	14,58%	80.951	14,18%
3	Katholik	19.898	7.05%	21.659	7,51%	41.557	7,28%
4	Hindu	199	0.07%	201	0,07%	400	0,07%
5	Budha	707	0.25%	721	0,25%	1.428	0,25%
6	Konghuchu	64	0.02%	56	0,02%	120	0,02%
7	Kepercayaan	16	0.01%	10	0,00%	26	0,00%
Jumlah		282.336	100,00%	288.540	100,00%	570.876	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut diperlukan karena agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memberikan kebebasan bagi setiap penduduk untuk menganut agama tertentu. Untuk Kota Surakarta, persentase tertinggi agama yang dianut adalah Islam yaitu 78,19%, kemudian disusul agama Kristen 14,18% dan Katholik 7,28%. Sedangkan Hindu, Budha, Konghucu serta aliran kepercayaan jumlahnya sangat sedikit yaitu 0,35%. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang menganut agama tertentu, maka pemerintah akan lebih mudah dalam hal perencanaan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian

Tabel IV.31 Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	LAWEYAN	857	17,71	905	18,05	1.762	17,89
2	SERENGAN	453	9,36	458	9,14	911	9,25
3	PASARKLIWON	712	14,72	742	14,80	1.454	14,76
4	JEBRES	1.271	26,27	1.306	26,05	2.577	26,16
5	BANJARSARI	1.545	31,93	1.602	31,96	3.147	31,95
	JUMLAH	4.838	100,00	5.013	100,00	9.851	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2016.

Berdasarkan Tabel IV.24 dapat diketahui bahwa jumlah kelahiran di Kota Surakarta tahun 2016 adalah sebanyak 9.851 kelahiran hidup, dimana angka kelahiran hidup tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 3.147 dengan 1.545 adalah laki-laki dan 1.602 perempuan atau sebesar 31,95% disusul Kecamatan Jebres sebanyak 2.577 kelahiran hidup atau 26,16%. Adapun kecamatan yang memiliki angka kelahiran hidup terendah adalah Kecamatan Serengan dengan angka 911 kelahiran hidup atau 9,25%.

Tabel IV.32 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.72 KOTA SURAKARTA							
No	Kecamatan		Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Kelahiran Kasar
	Kode	Nama		Tahun Sebelum	Tahun Sekarang	Pertengahan Tahun	
1	33.72.01	LAWEYAN	1.762	101.045	102.333	101.689	17,33
2	33.72.02	SERENGAN	911	54.005	54.649	54.327	16,77
3	33.72.03	PASAR KLIWON	1.454	84.566	86.679	85.622	16,98
4	33.72.04	JEBRES	2.577	142.237	146.209	144.223	17,87
5	33.72.05	BANJARSARI	3.147	175.753	181.006	178.380	17,64
Jumlah			9.851	557.606	570.876	564.241	17,45

Sumber : Dispendukcapil & Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Angka kelahiran kasar di kota Surakarta ada 17,45 artinya terdapat 17-18 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2016. Angka kelahiran kasar tertinggi terdapat di kecamatan Jebres dengan angka 17,87 yang artinya terdapat 17-18 kelahiran per 1000 penduduk. Pada Kecamatan Laweyan ada 17,33 kelahiran artinya 17-18 kelahiran per 1000 penduduk, sedangkan di Kecamatan Serengan terdapat 16,77 kelahiran yang artinya terdapat 16-17 kelahiran per 1000 penduduk. Terdapat 16,98 atau 16-17 kelahiran per 1000 penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon dan terdapat 17,64 atau 17-18 kelahiran per 1000 penduduk di Kecamatan Banjarsari.

Tabel IV.33 Jumlah Kematian per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Laweyan	228	16,24	198	18,39	426	17,17
2	Serengan	115	8,17	92	8,59	207	8,35
3	Pasar Kliwon	223	15,87	172	15,98	395	15,92
4	Jebres	350	24,92	256	23,83	606	24,45
5	Banjarsari	489	34,80	357	33,21	846	34,11
	Jumlah	1.404	100,00	1.075	100,00	2.479	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Berdasarkan diatas, diketahui bahwa angka kematian berjumlah 2.479 jiwa, yang tersebar dalam lima kecamatan. Kecamatan Serengan merupakan kecamatan terendah angka kematiannya yaitu 207 jiwa (8,35%), sedangkan Kecamatan Banjarsari sejumlah 846 jiwa (34.11 %).

Tabel IV.34 Angka Kematian Kasar per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.72 KOTA SURAKARTA							
No	Kecamatan		Jumlah Kematian	Jumlah Penduduk			Angka Kematian Kasar
	Kode	Nama		Tahun Sebelum	Tahun Sekarang	Pertengahan Tahun	
1	33.72.01	LAWEYAN	426	101.045	102.333	101.689	4,19
2	33.72.02	SERENGAN	207	54.005	54.649	54.327	3,81
3	33.72.03	PASAR KLIWON	395	84.566	86.679	85.622	4,61
4	33.72.04	JEBRES	606	142.237	146.209	144.223	4,20
5	33.72.05	BANJARSARI	846	175.753	181.006	178.380	4,74
		Jumlah	2.479	557.606	570.876	564.241	4,39

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Angka Kematian Kasar ini menunjukkan jumlah kematian pada tahun tertentu per seribu penduduk di suatu wilayah pada pertengahan tahun yang sama. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kematian di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka kematian kasar di Kota Surakarta adalah 4,39 artinya terdapat 4-5 kematian per seribu penduduk pada tahun 2016. Angka kematian kasar tertinggi di Kecamatan Banjarsari yaitu 4,74 yang artinya ada 4-5 kematian dalam seribu penduduk, sedangkan angka kematian kasar terendah di Kecamatan Serengan 3,81 yang artinya ada 3-4 kematian dalam seribu penduduk pada tahun 2016.

Bab V

Kualitas dan Mobilitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk suatu daerah antara lain :

1. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan merupakan hal yang utama, tanpa kesehatan manusia tidak dapat melaksanakan aktivitas apapun. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh kesehatannya.

2. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan merupakan modal yang penting dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, yang menjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

3. Tingkat kesejahteraan penduduk

Kesejahteraan penduduk ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dalam bab ini akan dibahas kualitas penduduk dengan indikator aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan mobilitas.

A. Aspek Kesehatan

Kesehatan penduduk dapat dilihat indikatornya dari aspek kelahiran dan kematian. Aspek kelahiran menyediakan data tentang angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran total, rasio anak dan perempuan. Sedang aspek kematian menyediakan data angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita dan angka kematian ibu.

1. Aspek Kelahiran

Jumlah kelahiran di Kota Surakarta pada tahun 2016 sebanyak 9.851 kelahiran hidup yang tersebar dalam lima kecamatan.

Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Surakarta Tahun 2016

Kecamatan	Perempuan (15-49) tahun	Anak (0-4) tahun	CWR
Laweyan	27.578	6.735	24,42
Serengan	14.528	3.557	24,48
Pasar Kliwon	22.778	6.157	27,03
Jebres	39.281	9.996	25,44
Banjarsari	49.169	12.193	24,79
Kota Surakarta	153.334	38.638	25,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan dapat digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Menurut data di atas pada tahun 2016 terdapat 38.638 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kota Surakarta, sedangkan banyaknya perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 153.334 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 25-26 balita.

2. Aspek Kematian

Tingkat kesehatan umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena erat hubungannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan membawa implikasi kebijakan peningkatan cakupan sarana dan pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku sehat masyarakat. Indikator kematian yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

a. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Neonatal, Kematian Post Neonatal

Angka kematian bayi/*Infant Mortality* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian Post Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Tabel V.2 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lahir Hidup	4.838	5.013	9.851
2	Lahir Mati	5	6	11
3	Kematian Bayi	15	18	33
4	Kematian Neonatal	3	10	13
5	Kematian Post Neo Natal	12	8	20
6	Kematian Anak Balita	6	2	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2016

b. Kematian Anak

Jumlah anak usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun 2016 di Kota Surakarta sebesar 30.690 sedang kematian anak balita ada 8 kasus. Jadi angka kematian anak adalah 0,26 Artinya pada tahun 2016 dari 1000 anak usia 0-4 tahun ada 1 kasus kematian. Rendahnya AKABA menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan anak dan Balita, sehingga meningkatkan angka harapan hidup.

c. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*)

Tabel V.3 Kematian Ibu Hamil & Pengelolaannya

No	Uraian	Umur<20th	20-35 th	>35	AKI
1	Kematian Ibu	0	3	1	40,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2016

Di Kota Surakarta terjadi kelahiran sebanyak 9.851 kelahiran hidup, dan terjadi 4 orang ibu meninggal karena persalinan dan pasca persalinan. Berdasarkan data angka kematian ibu/MMR sebesar 40,61 artinya ada 40-41 kasus kematian ibu dalam 100.000 peristiwa melahirkan.

B. Aspek Pendidikan

Profil penduduk Kota Surakarta dari aspek pendidikan akan dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk berusia seharusnya pada jenjang tersebut.

Tabel V.4 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan

TINGKATAN	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan			RASIO		
	Penduduk	APK	APM	Penduduk	APK	APM	Penduduk	APK	APM	APK	APM	
PAUD	Siswa PAUD	10,687	74.79	72.98	8,777	67.63	63.18	19,464	71.38	68.31	90.43	86.57
	Siswa PAUD 3 - 6	10,429			8,199			18,628				
	Penduduk 3 - 6	14,290			12,978			27,268				
SD	Siswa SD	25,850	101.92	92.63	26,535	106.69	100.00	52,385	104.28	96.28	104.69	92.63
	Siswa SD 7 - 12	23,494			24,869			48,363				
	Penduduk 7 - 12	25,364			24,870			50,234				
SMP	siswa SMP	11,918	98.23	75.59	10,817	79.85	78.65	22,735	88.53	77.20	81.29	96.10
	Siswa SMP 13 - 15	9,171			10,655			19,826				
	Penduduk 13 - 15	12,133			13,547			25,680				
SMA	Siswa SMA	11,385	90.95	70.86	10,028	115.29	68.64	21,413	100.93	69.95	78.89	96.86
	Siswa SMA 16 - 18	8,870			5,970			14,840				
	Penduduk 16 - 18	12,518			8,698			21,216				
PT	Mahasiswa	9,551	34.10	31.61	12,298	40.40	36.55	21,849	37.38	34.18	84.41	86.48
	Mahasiswa 19 - 24	8,853			11,126			19,979				
	Penduduk 19 - 24	28,010			30,443			58,453				

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (Susenas 2015)

Secara umum cakupan layanan pendidikan di Kota Surakarta telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Meskipun demikian, masih ada disparitas sekolah kelompok perempuan dan kelompok laki-laki pada jenjang PAUD dan SLTP/SMP. Selisih APK dan APM mengindikasikan adanya kelompok yang lambat jenjang (misalnya tidak naik kelas) atau terlalu cepat melampaui jenjang seharusnya (misalnya akselerasi atau masuk sekolah pada usia yang lebih muda dari batas umurnya). Dengan arti lain bahwa APK dan APM mengindikasikan proporsi murid yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

C. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi akan membahas tentang proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja.

Tabel V.5 Jumlah Penduduk Menurut Umur Tenaga Kerja

Kabupaten/Kota : 33.72 KOTA SURAKARTA						
No	Kecamatan		Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk 15 - 64 th)		Jumlah Penduduk	
	Kode	Nama	n	%	n	%
1	33.72.01	LAWEYAN	72.145	17.89%	102.333	17,93%
2	33.72.02	SERENGAN	38.524	9.55%	54.649	9,57%
3	33.72.03	PASAR KLIWON	60.620	15.03%	86.679	15,18%
4	33.72.04	JEBRES	104.003	25.79%	146.209	25,61%
5	33.72.05	BANJARSARI	127.982	31.74%	181.006	31,71%
Jumlah			403.274	100,00%	570.876	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk usia 15-64 tahun yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Data ini berguna bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan.

Berdasarkan pada tabel jumlah dan proporsi tenaga kerja, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja ada sebanyak 403.274 jiwa. Jumlah tenaga kerja ini terbilang cukup besar dengan jumlah sekitar 70,64% dari jumlah penduduk yang ada.

Tabel V.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Akuntan	7	8	15
2	Anggota BPK	1	2	3
3	Anggota DPD	0	1	1
4	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	10	2	12
5	Anggota DPRD Provinsi	0	0	0
6	Anggota DPR-RI	2	0	2
7	Anggota Kabinet/Kementerian	1	2	3
8	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
9	Apoteker	31	134	165
10	Arsitek	58	14	72
11	Belum/Tidak Bekerja	51.972	51.523	103.495
12	Biarawati	0	44	44
13	Bidan	0	136	136
14	Bupati	0	0	0
15	Buruh Harian Lepas	14.678	7.846	22.524
16	Buruh Nelayan/Perikanan	6	4	10
17	Buruh Peternakan	15	4	19
18	Buruh Tani/Perkebunan	92	38	130
19	Dokter	510	528	1.038
20	Dosen	689	572	1.261
21	Duta Besar	0	0	0
22	Gubernur	0	0	0
23	Guru	1.779	3.629	5.408
24	Imam Mesjid	10	0	10

25	Industri	94	49	143
26	Juru Masak	25	46	71
27	Karyawan BUMD	142	77	219
28	Karyawan BUMN	1.035	465	1.500
29	Karyawan Honorer	397	260	657
30	Karyawan Swasta	98.223	66.933	165.156
31	Kepala Desa	0	0	0
32	Kepolisian RI	900	89	989
33	Konstruksi	106	12	118
34	Konsultan	69	22	91
35	Lainnya	578	520	1.098
36	Mekanik	321	1	322
37	Mengurus Rumah Tangga	0	66.708	66.708
38	Nelayan/Perikanan	9	4	13
No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
39	Notaris	41	53	94
40	Paraji	0	9	9
41	Paranormal	4	2	6
42	Pastor	26	0	26
43	Pedagang	3.457	3.894	7.351
44	Pegawai Negeri Sipil	5.985	4.395	10.380
45	Pelajar/Mahasiswa	61.688	56.551	118.239
46	Pelaut	77	1	78
47	Pembantu Rumah Tangga	12	310	322
48	Penata Busana	4	13	17
49	Penata Rambut	13	41	54

50	Penata Rias	4	71	75
51	Pendeta	242	75	317
52	Peneliti	6	0	6
53	Pengacara	66	20	86
54	Pensiunan	5.131	3.353	8.484
55	Penterjemah	5	4	9
56	Penyiar Radio	6	5	11
57	Penyiar Televisi	2	0	2
58	Perancang Busana	2	6	8
59	Perangkat Desa	0	0	0
60	Perawat	87	463	550
61	Perdagangan	1.282	1.005	2.287
62	Petani/Pekebun	149	117	266
63	Peternak	35	3	38
64	Pialang	3	1	4
65	Pilot	0	0	0
66	Presiden	0	0	0
67	Promotor Acara	2	1	3
68	Psikiater/Psikolog	5	7	12
69	Seniman	239	59	298
70	Sopir	936	0	936
71	Tabib	4	2	6
72	Tentara Nasional Indonesia	817	37	854
73	Transportasi	162	9	171
74	Tukang Batu	365	0	365
75	Tukang Cukur	26	0	26

76	Tukang Gigi	2	1	3
77	Tukang Jahit	223	704	927
No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
78	Tukang Kayu	219	0	219
79	Tukang Las/Pandai Besi	137	0	137
80	Tukang Listrik	85	0	85
81	Tukang Sol Sepatu	17	1	18
82	Ustadz/Mubaligh	23	5	28
83	Wakil Bupati	0	0	0
84	Wakil Gubernur	0	0	0
85	Wakil Presiden	0	0	0
86	Wakil Walikota	1	0	1
87	Walikota	1	0	1
88	Wartawan	75	15	90
89	Wiraswasta	28.845	17.699	46.544
TOTAL		282.336	288.540	570.876

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan, terdapat tiga jenis pekerjaan yang terbilang besar jumlahnya. Pekerjaan terbesar sebagai karyawan swasta ada 165.156 orang, diikuti dengan pelajar/mahasiswa berjumlah 118.239 orang, selanjutnya disusul yang belum/tidak bekerja sejumlah 103.495 orang. Data tersebut menginformasikan bahwa sebagian besar jenis pekerjaan penduduk di kota Surakarta berada sektor swasta. Proporsi dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

D. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial ini disajikan informasi kependudukan dilihat dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang cacat, proporsi penduduk miskin.

1. Proporsi penduduk penyandang cacat

Tabel V.7 Angka Penyandang Cacat

Kabupaten/Kota : 33.72 KOTA SURAKARTA							
No	Kecamatan		Jumlah Penyandang Cacat		Jumlah Penduduk		Angka Penyandang Cacat
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	33.72.01	LAWEYAN	200	16	102.333	17,93	0,2
2	33.72.02	SERENGAN	108	8,64	54.649	9,57	0,2
3	33.72.03	PASAR KLIWON	188	15,04	86.679	15,18	0,22
4	33.72.04	JEBRES	391	31,28	146.209	25,61	0,27
5	33.72.05	BANJARSARI	363	29,04	181.006	31,71	0,2
Jumlah			1.250	100,00%	570.876	100,00%	0,22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Angka Penyandang Cacat menunjukkan banyaknya penduduk kota Surakarta yang menyandang cacat atau disabilitas. Informasi ini berguna untuk pengambilan kebijakan penyediaan akses atau fasilitas umum bagi penyandang cacat atau disabilitas. Berdasarkan informasi/ data pada tabel angka penyandang cacat diatas, terlihat bahwa banyaknya penduduk kota Surakarta yang menyandang cacat sebanyak 1.250 jiwa. Jumlah penduduk yang menyandang cacat tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk 570.876 yang hanya 0.22% yang menyandang cacat. Penyandang cacat terbanyak berada di kecamatan Jebres sebanyak 391 jiwa atau 0,27 % dari jumlah penduduk sebanyak 181.006. Kecamatan Laweyan terdapat penyandang cacat sebanyak 200 jiwa atau 0.2% dari jumlah penduduk sebanyak 102.333, untuk kecamatan Serengan ada 0.2% dari jumlah penduduk 54.649 atau sebanyak 108 jiwa yang menyandang cacat. Pada Kecamatan Pasar Kliwon dengan jumlah penduduk 86.679 terdapat 0.22% yang menyandang cacat atau sebanyak 188 jiwa, sedangkan di Kecamatan Banjarsari dengan jumlah penduduk 181.006 terdapat 0.22% atau sebanyak 188 jiwa yang menyandang cacat.

2. Proporsi Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan permasalahan di setiap kabupaten/kota bahkan negara. Di Kota Surakarta warga miskin diberi kemudahan-kemudahan dalam memperoleh fasilitas umum, meskipun demikian masih terus ditingkatkan. Dalam bidang jaminan kesehatan, keluarga miskin pembayaran iuran kesehatannya/BPJS ditanggung oleh pemerintah.

Tabel V.8 Penduduk Keluarga Miskin Penerima PBI BPJS Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga PBI BPJS
1	Laweyan	8.406	26.387
2	Serengan	5.665	16.274
3	Pasar Kliwon	10.177	32.106
4	Jebres	14.691	50.015
5	Banjarsari	18.111	61.954
Jumlah		57.050	186.736

Sumber : Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2016

Berdasarkan Tabel diatas warga dari keluarga miskin Kota Surakarta yang iurannya (Penerima Bantuan Iuran/PBI) dibayar dari pemerintah sebesar 186.736 jiwa. Dari jumlah tersebut dibayar melalui oleh APBN, APBD Propinsi, APBD Kota sebagaimana berikut ini:

Tabel V.9 Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Keluarga Miskin Berdasar Sumber Pembayaran

No	Kecamatan	PBI APBN	PBI APBD Propinsi	PBI APBD Kota	Jumlah
1	Laweyan	23.251	88	3.048	26.387
2	Serengan	13.495	100	2.679	16.274
3	Pasar Kliwon	26.658	281	5.167	32.106
4	Jebres	42.225	190	7.600	50.015
5	Banjarsari	52.851	266	8.837	61.954
Jumlah		158.480	925	27.331	186.736

Sumber : Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2016

E. Mobilitas/Migrasi

Adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Migrasi dapat dipengaruhi oleh daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena ketidaktersedianya sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan bagi penduduk.

Tabel V.10 Migrasi Keluar/Pindah Tahun 2016

NO	BULAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	LAWEYAN	720	837	1.557
2	SERENGAN	363	395	758
3	PASAR KLIWON	478	565	1.043
4	JEBRES	872	986	1.858
5	BANJARSARI	1.233	1.340	2.573
	JUMLAH	3.666	4.123	7.789

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Tabel V.11 Migrasi Masuk / Datang Tahun 2016

NO	BULAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	LAWEYAN	790	949	1.739
2	SERENGAN	358	412	770
3	PASAR KLIWON	568	647	1.215
4	JEBRES	916	1.065	1.981
5	BANJARSARI	1.420	1.609	3.029
	JUMLAH	4.052	4.682	8.734

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah

Dari data di atas, migrasi masuk/datang di Kota Surakarta Tahun 2016 lebih banyak 8.734 jiwa dibandingkan yang migrasi keluar 7.789 jiwa. Hal tersebut menunjukkan Kota Surakarta masih mempunyai daya tarik yang cukup tinggi karena migrasi masuknya lebih banyak (945 jiwa).

Tabel V.12 Angka Migrasi Netto per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi			Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	Angka Migrasi Netto
		Masuk	Keluar	Selisih		
1	Laweyan	1.739	1.557	182	101.689	1,79
2	Serengan	770	758	12	54.327	0,22
3	Pasar Kliwon	1.215	1.043	172	85.622	2,00
4	Jebres	1.981	1.858	123	144.223	0,85
5	Banjarsari	3.029	2.573	456	178.380	2,55
	Jumlah	8.734	7.789	945	564.241	1,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Tabel V.13 Jumlah Migrasi Bruto per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Masuk		Jumlah Migrasi Keluar		Jumlah Migrasi Bruto	
		n	%	N	%	n	%
1	Laweyan	1.739	19,91	1.557	19,99	3.296	19,95
2	Serengan	770	8,82	758	9,73	1.528	9,25
3	Pasar Kliwon	1.215	13,91	1.043	13,39	2.258	13,66
4	Jebres	1.981	22,68	1.858	23,86	3.839	23,24
5	Banjarsari	3.029	34,68	2.573	33,03	5.602	33,90
	Jumlah	8.734	100,00	7.789	100,00	16.523	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah

Dari tabel V.13 tersebut terlihat bahwa migrasi masuk tahun 2016 sebanyak 8.734 jiwa. Migrasi masuk terbesar di wilayah Kecamatan Banjarsari, yang memang wilayah Banjarsari Utara merupakan wilayah pemukiman dan perkembangan pembangunan wilayah kota yang diarahkan ke “Solo Utara”. Sedangkan migrasi keluar terbesar juga di wilayah Kecamatan Banjarsari, yang diduga karena beberapa penduduk terdesakoleh pendatang, atau perkembangan fasilitas perdagangan dan industry di wilayah perbatasan sehingga berpindah untuk pengembangan usaha dan penghidupan mereka.

Angka Migrasi Neto merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Angka migrasi netto penduduk Kota Surakarta tahun 2016 adalah migrasi netto positif sebesar 1,67. Hal tersebut menunjukkan migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, yang berarti setiap 1000 penduduk Kota Surakarta terdapat 1-2 jiwa migran masuk.

Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan merupakan bukti status legal seseorang untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dokumen kependudukan merupakan kewajiban negara untuk memberikan status legal bagi warganya dan sumber data kependudukan bagi pihak yang berkepentingan.

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah kota tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang syah dan mempunyai kedudukan hukum.

Tabel VI.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kelurahan Tahun 2016

No	Kelurahan Nama	Jumlah Kepala Keluarga						Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					
		Pria		Wanita		Jumlah		Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	LAWEYAN	25.473	17.81%	6.760	18,25%	32.233	17,90%	25.473	17.81%	6.760	18,25%	32.233	17,90%
1	PAJANG	6.230	4.36%	1.469	3,97%	7.699	4,28%	6.230	4.36%	1.469	3,97%	7.699	4,28%
2	LAWEYAN	534	0.37%	167	0,45%	701	0,39%	534	0.37%	167	0,45%	701	0,39%
3	BUMI	1.561	1.09%	451	1,22%	2.012	1,12%	1.561	1.09%	451	1,22%	2.012	1,12%

4	PANULARAN	2.351	1.64%	665	1,80%	3.016	1,68%	2.351	1.64%	665	1,80%	3.016	1,68%
5	PENUMPING	989	0.69%	344	0,93%	1.333	0,74%	989	0.69%	344	0,93%	1.333	0,74%
6	SRIWEDARI	975	0.68%	332	0,90%	1.307	0,73%	975	0.68%	332	0,90%	1.307	0,73%
7	PURWOSARI	2.580	1.80%	740	2,00%	3.320	1,84%	2.580	1.80%	740	2,00%	3.320	1,84%
8	SONDAKAN	3.045	2.13%	837	2,26%	3.882	2,16%	3.045	2.13%	837	2,26%	3.882	2,16%
9	KERTEN	2.348	1.64%	657	1,77%	3.005	1,67%	2.348	1.64%	657	1,77%	3.005	1,67%
10	JAJAR	2.345	1.64%	576	1,56%	2.921	1,62%	2.345	1.64%	576	1,56%	2.921	1,62%
11	KARANGASEM	2.515	1.76%	522	1,41%	3.037	1,69%	2.515	1.76%	522	1,41%	3.037	1,69%
SERENGAN		13.782	9.64%	4.005	10,81%	17.787	9,88%	13.782	9.64%	4.005	10,81%	17.787	9,88%
12	JOYOTAKAN	1.955	1.37%	514	1,39%	2.469	1,37%	1.955	1.37%	514	1,39%	2.469	1,37%
13	DANUKUSUMAN	2.514	1.76%	790	2,13%	3.304	1,84%	2.514	1.76%	790	2,13%	3.304	1,84%
14	SERENGAN	2.811	1.97%	832	2,25%	3.643	2,02%	2.811	1.97%	832	2,25%	3.643	2,02%
15	TIPES	3.147	2.20%	823	2,22%	3.970	2,21%	3.147	2.20%	823	2,22%	3.970	2,21%
16	KRATONAN	1.371	0.96%	434	1,17%	1.805	1,00%	1.371	0.96%	434	1,17%	1.805	1,00%
17	JAYENGAN	1.027	0.72%	299	0,81%	1.326	0,74%	1.027	0.72%	299	0,81%	1.326	0,74%
18	KEMPLAYAN	957	0.67%	313	0,85%	1.270	0,71%	957	0.67%	313	0,85%	1.270	0,71%
PASAR KLIWON		21.502	15.04%	5.728	15,47%	27.230	15,13%	21.502	15.04%	5.728	15,47%	27.230	15,13%
19	JOYOSURAN	2.726	1.91%	762	2,06%	3.488	1,94%	2.726	1.91%	762	2,06%	3.488	1,94%
20	SEMANGGI	8.792	6.15%	2.096	5,66%	10.888	6,05%	8.792	6.15%	2.096	5,66%	10.888	6,05%
21	PASAR KLIWON	1.306	0.91%	419	1,13%	1.725	0,96%	1.306	0.91%	419	1,13%	1.725	0,96%
22	GAJAHAN	975	0.68%	299	0,81%	1.274	0,71%	975	0.68%	299	0,81%	1.274	0,71%
23	BALUWARTI	1.626	1.14%	481	1,30%	2.107	1,17%	1.626	1.14%	481	1,30%	2.107	1,17%
24	KAMPUNGBARU	736	0.51%	237	0,64%	973	0,54%	736	0.51%	237	0,64%	973	0,54%
25	KEDUNG LUMBU	1.380	0.97%	419	1,13%	1.799	1,00%	1.380	0.97%	419	1,13%	1.799	1,00%
26	SANGKRAH	3.344	2.34%	805	2,17%	4.149	2,30%	3.344	2.34%	805	2,17%	4.149	2,30%
27	KAUMAN	617	0.43%	210	0,57%	827	0,46%	617	0.43%	210	0,57%	827	0,46%
JEBRES		37.362	26.13%	9.034	24,39%	46.396	25,77%	37.362	26.13%	9.034	24,39%	46.396	25,77%
28	KEPATIHAN KULON	603	0.42%	219	0,59%	822	0,46%	603	0.42%	219	0,59%	822	0,46%

29	KEPATIHAN WETAN	651	0.46%	215	0,58%	866	0,48%	651	0.46%	215	0,58%	866	0,48%
30	SUDIROPRAJAN	931	0.65%	396	1,07%	1.327	0,74%	931	0.65%	396	1,07%	1.327	0,74%
31	GANDEKAN	2.363	1.65%	662	1,79%	3.025	1,68%	2.363	1.65%	662	1,79%	3.025	1,68%
32	SEWU	1.874	1.31%	487	1,31%	2.361	1,31%	1.874	1.31%	487	1,31%	2.361	1,31%
33	PUCANGSAWIT	3.589	2.51%	782	2,11%	4.371	2,43%	3.589	2.51%	782	2,11%	4.371	2,43%
34	JAGALAN	3.076	2.15%	907	2,45%	3.983	2,21%	3.076	2.15%	907	2,45%	3.983	2,21%
35	PURWODININGRATAN	1.260	0.88%	424	1,14%	1.684	0,94%	1.260	0.88%	424	1,14%	1.684	0,94%
36	TEGALHARJO	1.234	0.86%	395	1,07%	1.629	0,90%	1.234	0.86%	395	1,07%	1.629	0,90%
37	JEBRES	8.516	5.96%	1.947	5,26%	10.463	5,81%	8.516	5.96%	1.947	5,26%	10.463	5,81%
38	MOJOSONGO	13.265	9.28%	2.600	7,02%	15.865	8,81%	13.265	9.28%	2.600	7,02%	15.865	8,81%
BANJARSARI		44.87	31.38%	11.511	31,08%	56.381	31,32%	44.87	31.38%	11.511	31,08%	56.381	31,32%
39	KADIPIRO	13.739	9.61%	2.780	7,51%	16.519	9,18%	13.739	9.61%	2.780	7,51%	16.519	9,18%
40	NUSUKAN	7.930	5.55%	2.145	5,79%	10.075	5,60%	7.930	5.55%	2.145	5,79%	10.075	5,60%
41	GILINGAN	5.066	3.54%	1.519	4,10%	6.585	3,66%	5.066	3.54%	1.519	4,10%	6.585	3,66%
42	SETABELAN	995	0.70%	331	0,89%	1.326	0,74%	995	0.70%	331	0,89%	1.326	0,74%
43	KESTALAN	752	0.53%	246	0,66%	998	0,55%	752	0.53%	246	0,66%	998	0,55%
44	KEPRABON	731	0.51%	272	0,73%	1.003	0,56%	731	0.51%	272	0,73%	1.003	0,56%
45	TIMURAN	676	0.47%	259	0,70%	935	0,52%	676	0.47%	259	0,70%	935	0,52%
46	KETELAN	854	0.60%	292	0,79%	1.146	0,64%	854	0.60%	292	0,79%	1.146	0,64%
47	PUNGGAWAN	1.067	0.75%	338	0,91%	1.405	0,78%	1.067	0.75%	338	0,91%	1.405	0,78%
48	MANGKUBUMEN	2.401	1.68%	761	2,05%	3.162	1,76%	2.401	1.68%	761	2,05%	3.162	1,76%
49	MANAHAN	2.619	1.83%	831	2,24%	3.45	1,92%	2.619	1.83%	831	2,24%	3.45	1,92%
50	SUMBER	4.509	3.15%	1.076	2,91%	5.585	3,10%	4.509	3.15%	1.076	2,91%	5.585	3,10%
51	BANYUANYAR	3.531	2.47%	661	1,78%	4.192	2,33%	3.531	2.47%	661	1,78%	4.192	2,33%
Jumlah		142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%	142.989	100,00%	37.038	100,00%	180.027	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Menurut data di atas, jumlah keluarga di Kota Surakarta sebanyak 180.027 keluarga, yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki 142.989 keluarga dan kepala keluarga perempuan berjumlah 37.038 keluarga. Jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kelurahan Kadipiro, yaitu sebesar 16.519 KK, sedang jumlah kepala keluarga terkecil adalah Kelurahan Laweyan sebesar 701 KK.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah.

Tabel VI.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LAWEYAN	35.659	37.895	73.554
2	SERENGAN	19.291	20.527	39.818
3	PASAR KLIWON	30.303	31.281	61.584
4	JEBRES	51.979	53.679	105.658
5	BANJARSARI	62.451	66.571	129.022
JUMLAH		199.683	209.953	409.636

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP sebesar 96,01 %. Kecamatan Serengan merupakan kecamatan terendah cakupan kepemilikan KTP-nya. Jumlah kepemilikan tersebut termasuk Surat Keterangan (Suket), karena ketiadaan blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Namun demikian tidak menafikan masih ada penduduk yang belum memiliki KTP, termasuk penduduk yang masih dalam proses mengurus KTP.

Meskipun cakupan kepemilikan KTP sudah tinggi, namun sosialisasi dan strategi kepemilikan KTP melalui kegiatan jemput bola ke rumah, mobil keliling ke kelurahan dan di arena *car free day* setiap minggu serta acara sonjo wargo mengikuti Walikota Surakarta keliling kelurahan terus dilaksanakan.

C. Penerbitan Akta

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak (6) pengesahan anak.

1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti syah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang ayah dan ibu sebagai orang tuanya.

Tabel VI.3 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran menurut Waktu Pelaporan 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah	
		Laki-Laki		Perempuan		Baru	Terlambat
		Baru	Terlambat	Baru	Terlambat		
1	Laweyan	581	391	520	368	1.101	759
2	Serengan	327	188	265	206	592	394
3	Pasar Kliwon	534	440	518	425	1.052	865
4	Jebres	830	623	865	567	1.695	1.190
5	Banjarsari	1.071	806	978	709	2.049	1.515
	Jumlah	3.343	2.448	3.146	2275	6.489	4.723
	Jumlah Total	5.791		5.421		11.212	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah

Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, kartu keluarga, hak waris, kesehatan dan dokumen lainnya.

Penerbitan akta kelahiran terbanyak di Kecamatan Banjarsari sebesar 3.564 dokumen dan terendah di Kecamatan Serengan sebesar 986 dokumen. Penerbitan akta kelahiran memerlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Jumlah penerbitan akta kelahiran lebih besar dari jumlah kelahiran, dikarenakan banyak masyarakat yang mencari akta kelahiran yang lahir di bawah tahun 2016. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel VI.4 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0-18 TAHUN	ANAK MEMILIKI AKTA		ANAK BELUM MEMILIKI AKTA	
		JUMLAH ANAK	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	LAWEYAN	27.352	26.121	95,50%	1.231	4,50%
2	SERENGAN	14.441	13.844	95,87%	597	4,13%
3	PASAR KLIWON	23.812	22.805	95,77%	1.007	4,23%
4	JEBRES	38.668	37.473	96,91%	1.195	3,09%
5	BANJARSARI	49.216	47.289	96,08%	1.927	3,92%
JUMLAH		153.489	147.532	96,12%	5.957	3,88%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Seperti yang tercantum dalam tabel diatas, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta sudah tinggi (96,12%), namun tetap diperlukan kerja sama dan strategi agar cakupan kepemilikan akta kelahiran terus meningkat.

2. Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel VI.5 Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	LK	PR	Jumlah
1	Laweyan	209	179	388
2	Serengan	113	100	213
3	Pasar Kliwon	202	156	358
4	Jebres	310	234	544
5	Banjarsari	451	311	762
Jumlah		1.285	980	2.265

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Akta Kematian sangat berguna untuk mengurus santunan kematian, hak waris, kepegawaian, asuransi dan peristiwa perdata lainnya. Dari tabel, kelompok yang terlambat mengurus akta kematian ada 555 jiwa (24,50 %). Hal tersebut diduga karena masyarakat cenderung mengurus akta kematian bila sudah terbentur pada kebutuhan yang memerlukan akta kematian.

Tabel VI.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian menurut Waktu Pelaporan

No	Bulan	Kematian Baru	Kematian Terlambat	Jumlah
1	Januari	71	0	71
2	Februari	139	13	152
3	Maret	151	33	184
4	April	157	34	191
5	Mei	162	46	208
6	Juni	162	48	210
7	Juli	121	58	179
8	Agustus	173	78	251
9	September	133	42	175
10	Oktober	139	84	223
11	Nopember	177	64	241
12	Desember	125	55	180
Jumlah		1710	555	2.265
Jumlah Peristiwa Kematian				2.479
Cakupan Kepemilikan Tahun 2016				91,37 %

3. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan per-Undang-Undang yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan yang muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinannya.

Tabel VI.7 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2016

No	Kecamatan	LK	PR	Jumlah	Persentase
1	Laweyan	53	53	106	9,42
2	Serengan	51	59	110	9,76
3	Pasar Kliwon	47	67	114	10,11
4	Jebres	178	233	411	36,46
5	Banjarsari	172	214	386	34,25
Total		501	626	1.127	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Penerbitan akta perkawinan terbesar di Kecamatan Jebres sebesar 411 dokumen. Kepemilikan akta perkawinan diperlukan ketika terjadi kasus yang menyangkut hak-hak perdata suami-istri.

4. Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan suatu bukti otentik putusannya suatu ikatan perkawinan. Bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, dan bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama maka perceraianya melalui Pengadilan Agama, yang selanjutnya Keputusan Pengadilan Agama tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan akta cerainya. Penerbitan akta perceraian terbesar terjadi di Kecamatan Jebres, yaitu sebanyak 83 dokumen (34,43 %).

Tabel VI.8 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Laweyan	12	16	28	11,63
2	Serengan	13	15	28	11,63
3	Pasar Kliwon	10	10	20	8,29
4	Jebres	42	41	83	34,43
5	Banjarsari	38	44	82	34,02
Total		115	126	241	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

5. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak

Jumlah kepemilikan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak.

Tabel VI.9 Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak Tahun 2016

No	Peristiwa	Jumlah Pencatatan
1	Pengakuan Anak	1
2	Pengesahan Anak	6
3	Pengangkatan Anak	8

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Pencatatan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak ini menunjukkan kesadaran masyarakat mengurus dasar legalitas peristiwa yang berdampak pada hak keperdataan

Bab VII

Kesimpulan dan Implikasi

Data perkembangan kependudukan merupakan data yang strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

A. Kesimpulan

1. Aspek Kuantitas

- a. Peningkatan kepadatan penduduk tiap kecamatan di Kota Surakarta perlu perhatian yang serius, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk. Bila hal tersebut tidak diperhatikan akan berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang berimplikasi pada resiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.
- b. Proporsi jumlah penduduk jenis kelamin perempuan yang lebih besar berimplikasi pada pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Kesenjangan Gender. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, mengindikasikan jumlah kepala keluarga perempuan terutama pada usia lanjut akan lebih besar. Kelompok perempuan kepala keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam kebijakan sosial pemerintah, maka diperlukan kebijakan jaminan sosial.
- c. Kelompok umur 10-19 tahun yang sebesar 15,3 % merupakan kelompok umur yang perlu mendapat perhatian, terutama pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut untuk memaksimalkan bonus demografi tahun 2020-2030. Sedangkan kelompok umur 20-29 yang sebesar 14,51% merupakan kelompok produktif ini harus disiapkan kebutuhan lapangan tenaga kerja dan kecakapan bertahan hidup untuk menciptakan pendapatan ekonomis bagi diri dan keluarganya.
- d. Kelompok umur di atas 64 tahun, berjumlah 42.089 jiwa atau sebesar 7,37% dan didominasi oleh perempuan, yang membawa konsekuensi bagi kebijakan alokasi anggaran untuk program kegiatan Lansia dan jaminan sosial.

e. Pendidikan terakhir kepala keluarga di bawah SLTA cukup besar yaitu 40,80%. Kepala keluarga yang berpendidikan rendah kemungkinan juga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga kemungkinan besar mereka juga tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi keluarganya. Kepala keluarga ini biasanya bekerja di sektor informal. Kelompok ini perlu difasilitasi untuk program kegiatan daerah terkait peningkatan pendapatan keluarga.

2. Aspek Kualitas

a. Pada Tahun 2016 di Kota Surakarta ditemukan angka kematian bayi sebesar 3,32 yang berarti terjadi kematian bayi sebanyak 3-4 bayi per seribu kelahiran hidup. Angka Neonatal sebesar 1,31 berarti terjadi kematian 1-2 bayi sebelum berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka Post Neonatal sebesar 2,01 artinya terjadi kematian 2 bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Hal tersebut berimplikasi pada perlunya prioritas kebutuhan perbaikan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan dan perilaku hidup sehat lingkungan keluarga.

b. Jumlah penyandang cacat di Kota Surakarta, meskipun hanya 0,22 % dari jumlah penduduk tetap perlu adanya kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kelompok penyandang cacat agar tetap bisa bersosialisasi seperti warga normal lainnya.

c. Jumlah penerima bantuan iuran BPJS tingkat Kota Surakarta lebih kecil dari APBN, karena keterbatasan APBD Kota Surakarta. Masih adanya peluang untuk pembayaran PBI dari APBN, diharapkan dinas terkait untuk koordinasi sehingga kuota peserta BPJS dari APBN dapat dimaksimalkan.

3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan merupakan tantangan yang memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah kota dan kalangan penduduk. Masyarakat harus dididik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi, sehingga pendokumentasian data kependudukan dilaksanakan dengan tertib, dan peristiwa pencatatan sipil baik kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta mobilitasnya dilaksanakan dengan tertib pula.

Aparatur pelaksana rekam data kependudukan perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diorientasikan pada ketelitian verifikasi formulir agar konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk pencatatan sipil. Beberapa hal yang mejadi perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2016 sebesar 100 %. Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga seorang perempuan, terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Hal tersebut dapat dijadikan prioritas pemerintah untuk menentukan kebijakan kelompok sasaran jaminan sosial.
- b. Persentase kepemilikan KTP sebesar 96,12 % sudah cukup tinggi. Tetapi sosialisasi tentang pentingnya KTP dalam menunjang kebutuhan publik lainnya menjadi prioritas Pemerintah Kota Surakarta.
- c. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, terutama akta kematian menjadi prioritas dan perhatian Pemerintah Kota Surakarta. Kebijakan dan strategi dengan mendekati pelayanan kepada masyarakat dengan mobil keliling di kelurahan-kelurahan, *Car Free Day*, acara *Sonjo Wargo* Walikota hendaknya terus ditingkatkan agar masyarakat Kota Surakarta mudah untuk mengaksesnya dalam mencari dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil.

4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan

Tantangan yang dihadapi untuk pembangunan daerah berwawasan kependudukan di Kota Surakarta :

- a. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya akurasi data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Usaha sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya akurasi data dapat dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan. Setiap ada peristiwa kependudukan dan dilaporkan, maka data akan semakin valid, akurat sehingga pengambilan kebijakan dapat dilaksanakan dengan tepat pula.
- b. Koordinasi antar dinas/OPD untuk sinkronisasi data dan perencanaan pembangunan berbasis data belum dilaksanakan optimal. Aspek kependudukan merupakan aspek yang strategis dan memerlukan sektor yang lain. Data kependudukan yang akurat dapat dijadikan perencanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan strategis yang memerlukan data kependudukan baik pemerintah maupun pihak lain dan dunia usaha. Oleh karena itu koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral sangat diperlukan dalam membangun data yang akurat dan valid.
- c. Koordinasi antar lembaga/kementrian yang berwenang mengeluarkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil perlu terus ditingkatkan. Pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama(Kementrian Agama), pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Kementrian Hukum & HAM, pelayanan KTP KK dan akta belum terkoneksi seluruhnya.

B. Implikasi Kebijakan

1. Kebijakan akurasi dan validasi kependudukan

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil perlu mengoptimalkan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi dan validitas data. Dukungan dari dinas/OPD lain sangat dibutuhkan agar akurasi dan kelengkapan data dapat tersaji dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan data kependudukan.

2. Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Kota Surakarta merupakan kota yang padat, menarik warga sekitarnya untuk menetap di Kota Surakarta. Selain itu pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dapat dikoordinasikan dengan lintas sektor/dinas lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Memperpanjang waktu penundaan usia kawin
2. Mengatur jumlah kelahiran
3. Mengurangi jumlah kematian
4. Menjaga keseimbangan struktur penduduk.

3. Kebijakan Penataan Ruang dan Penyediaan Sarana Prasarana Berwawasan Kependudukan.

Kebijakan pengembangan kependudukan yang meliputi perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang dan distribusi kepadatan penduduk. Hal tersebut perlu ketersediaan sarana prasarana kebutuhan warga perkotaan. Proyeksi kepadatan maksimal penduduk suatu wilayah dapat dijadikan rujukan perencanaan daya tampung dan daya dukung wilayah.

4. Kebijakan Ketahanan Pangan

Perkiraan pertumbuhan penduduk dapat dijadikan pertimbangan dalam penyediaan cadangan pangan daerah dan sumber kebutuhan energi protein.

5. Kebijakan Kesehatan

Umur median penduduk Kota Surakarta 33,54 tahun, ini berarti termasuk kategori umur tua karena di atas 30 tahun. Setengah penduduk Kota Surakarta berusia di atas 33,54 tahun dan setengahnya lagi di bawah 33,54 tahun. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kebijakan jaminan kesehatan Lansia.

6. Kebijakan Pendidikan

Jumlah penduduk usia pelajar (10-19 tahun) berjumlah 15,3 %, perlu perhatian khusus. Di usia pelajar ini perlu dimasukkan kurikulum/program yang berkaitan dengan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan agar dapat bersaing dan mempunyai ketrampilan kecakapan tertentu.

7. Kebijakan Ketenagakerjaan

Data tentang angkatan kerja yang belum bekerja menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dijadikan pertimbangan penyusunan kebijakan penyediaan lapangan kerja.

8. Kebijakan Sosial

Data penduduk berdasarkan kecacatan, perceraian dan perempuan kepala rumah tangga dapat dijadikan pertimbangan penyusunan kebijakan penanganan masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan permasalahan bersama yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kecacatan, status sosial memerlukan kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga dapat bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

